

# LAPORAN KINERJA



LPMP KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2021



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya LPMP Provinsi Kalimantan Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dengan tepat waktu. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban LPMP Provinsi Kalimantan Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program/kegiatan yang telah dinyatakan dalam perjanjian kinerja, yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. Perjanjian Kinerja secara tersurat menyampaikan indikator kinerja yang terukur, yang menyajikan informasi kinerja dalam pencapaian sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan LPMP Provinsi Kalimantan Timur kepada Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah.

Secara umum LPMP Provinsi Kalimantan Timur telah merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. Dalam perjanjian Kinerja tersebut ditetapkan dua sasaran strategis, yakni: (1) Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan, yang terdiri atas 3 indikator kinerja; (2) Terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang baik, yang terdiri atas dua indikator kinerja.

Kami menyadari bahwa masih banyak tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga terkait penjaminan mutu pendidikan di daerah, diantaranya:

1. Masih rendahnya capaian SNP di sebagian Kab/Kota menunjukkan bahwa di satuan pendidikan tersebut perlu perhatian yang lebih dalam meningkatkan kinerja satuan pendidikan agar capaian SNP dapat terpenuhi;
2. Budaya mutu belum tumbuh dan berkembang secara optimal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
3. Kemampuan literasi, terutama numerasi siswa masih perlu ditingkatkan;
4. Belum adanya sistem informasi capaian kinerja seluruh sekolah yang saling terintegrasi dan terpadu yang dapat diakses secara cepat, tepat dan akurat.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dicapai LPMP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebagai mata rantai pelaksanaan penjaminan mutu yang berkelanjutan. Diharapkan laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Samarinda, 29 Desember 2021  
Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur,  
  
Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd.  
NIP. 097002011997021001



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	iii
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi.....	3
D. Isu Strategis .....	4
<b>BAB II – PERENCANAAN KINERJA LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b> .....	6
<b>BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
B. Realisasi Anggaran .....	44
<b>BAB IV – PENUTUP</b> .....	49
<b>LAMPIRAN</b>	
- Pengukuran Kinerja Tahun 2021	
- Capaian Kinerja Sasaran (Output) Tahun 2021	
- Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2021	
- Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2021	
- Pernyataan Telah Direviu	

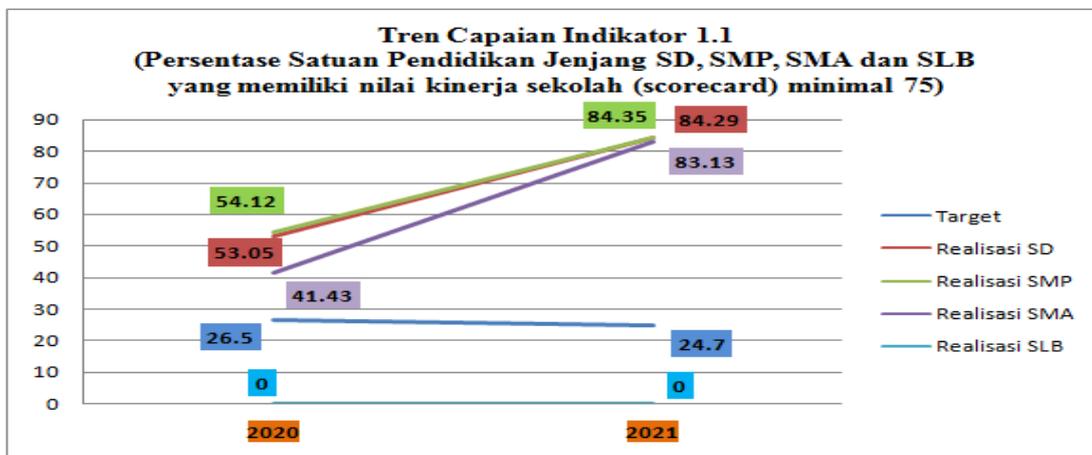
## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Rencana Strategis LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024, yang memasuki tahun kedua pada RPJMN-IV. Laporan kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur ini memberikan informasi tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) *output*, yang terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur.

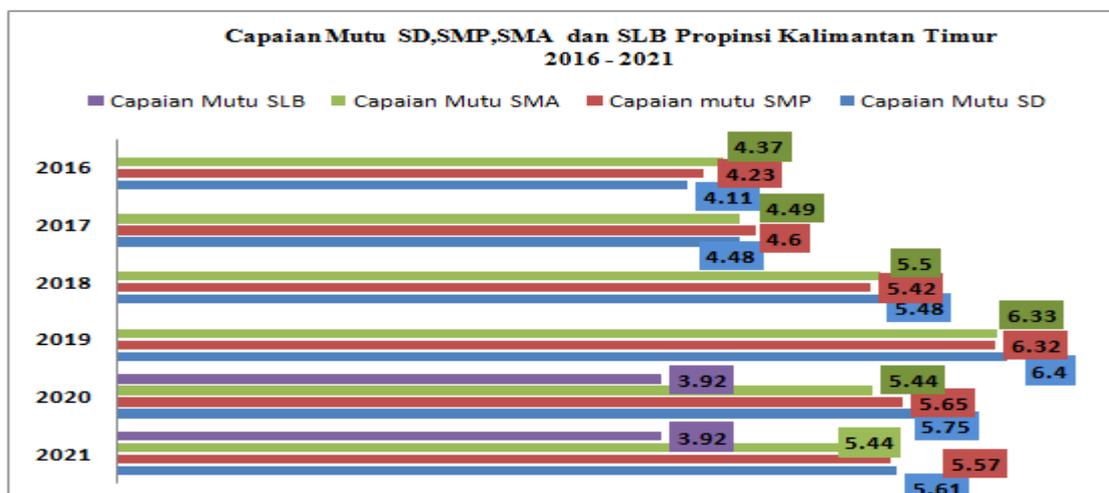
Adapun hasil capaian indikator kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

### 1. Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan

#### 1.1. Indikator kinerja Persentase satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75.



#### Capaian Mutu Propinsi Kalimantan Timur 2016 – 2021 Berdasarkan Aplikasi PMP Online 2021

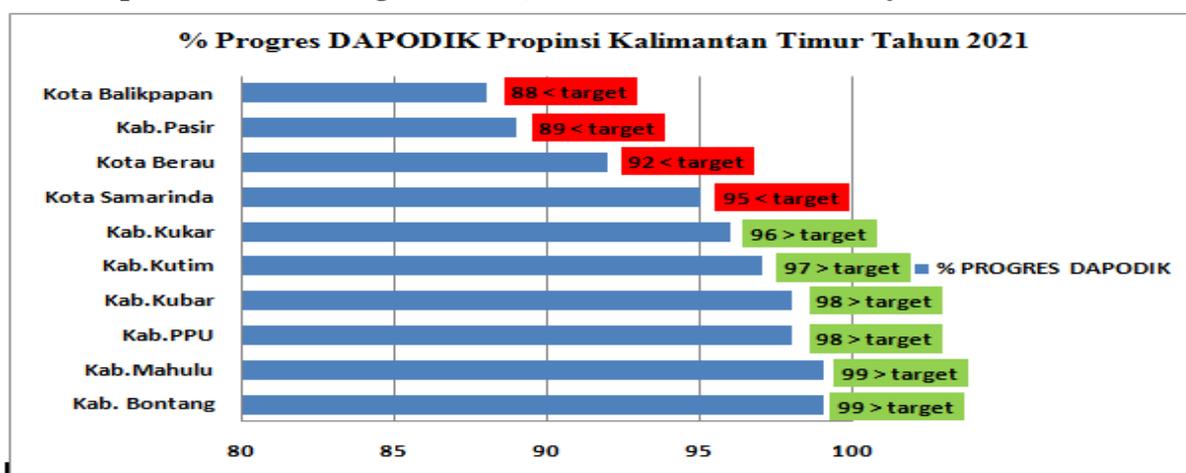


**1.2.Indikator Kinerja Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.**

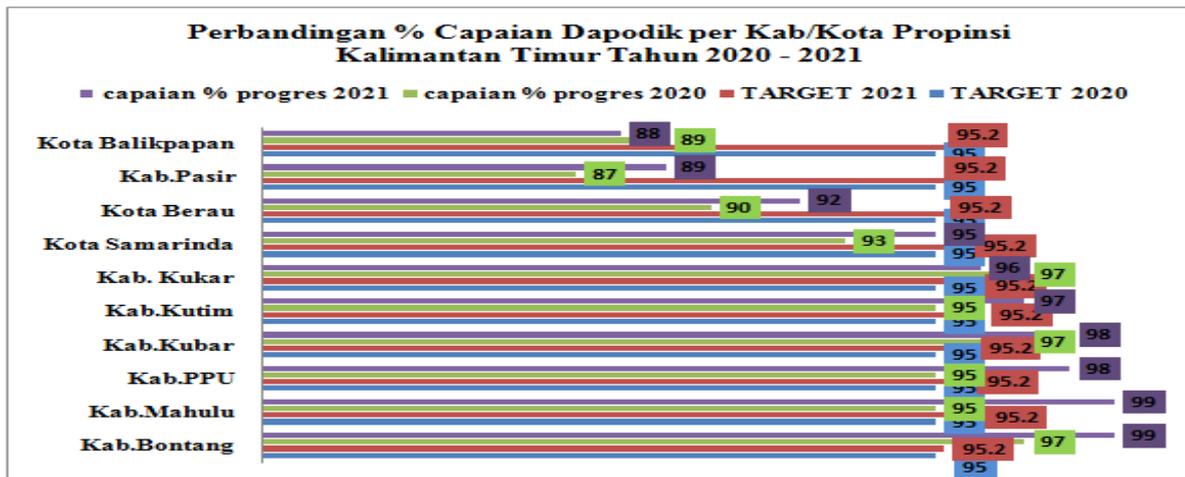
Realisasi (%) 2020	Tahun 2021			Target Renstra 2021	Capaian Terhadap Renstra 2021
	Target PK (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
0 %	5 %	100 %	1,40 %	5 %	172 %

Berdasarkan data hasil Assesment Nasional yang diperoleh dari pusat assesment nasional tahun 2021 sesuai tabel di atas diperoleh persentase capaian kesenjangan di propinsi Kalimantan Timur sebesar 1,40%. Hasil ini berada dibawah dari target 5% hal ini menunjukkan hasil yang baik karena semakin kecil nilai kesenjangan maka semakin baik berarti terdapat 98.6 % tidak ada kesenjangan. Jika dihitung ketercapaian realisasi terhadap target yang ada, capaian telah melebihi target yang berarti dengan progress 100% kelebihanannya dapat dihitung dengan mengambil selisih target dengan realisasi sebesar 3.6 %. Jika hasil dari selisih ini dibandingkan dengan target maka diperoleh persentase sebesar 72 %. Sehingga total realisasi menjadi 172 % atau 72 % melebihi target.

**1.3 Indikator kinerja Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan pendidikan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan.**

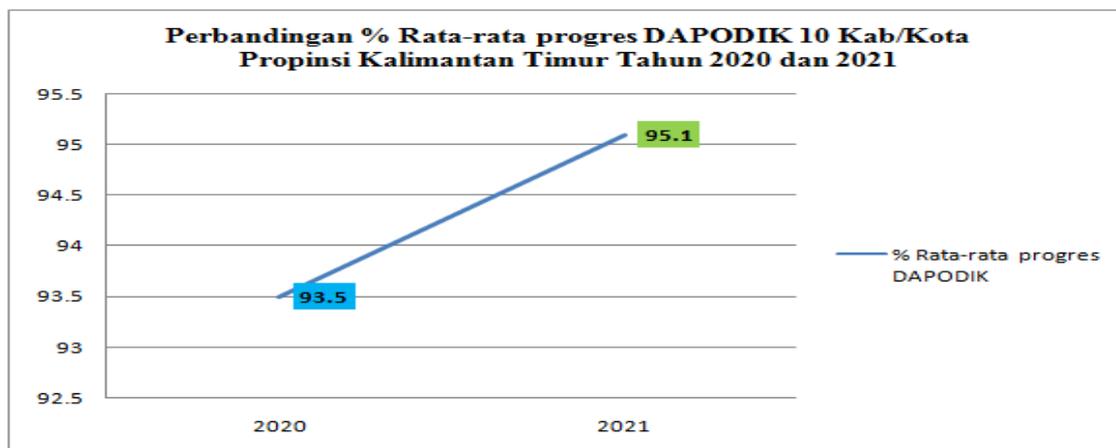


Sumber : Aplikasi Online DAPODIK 2021 per tanggal 6 Desember 2021



Sumber : Aplikasi Online DAPODIK 2020, 2021 per tanggal 15 Desember 2020 dan 6 Desember 2021

Grafik perbandingan capaian persentase rata – rata progres DAPODIK dari 10 kab/kota Propinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut :



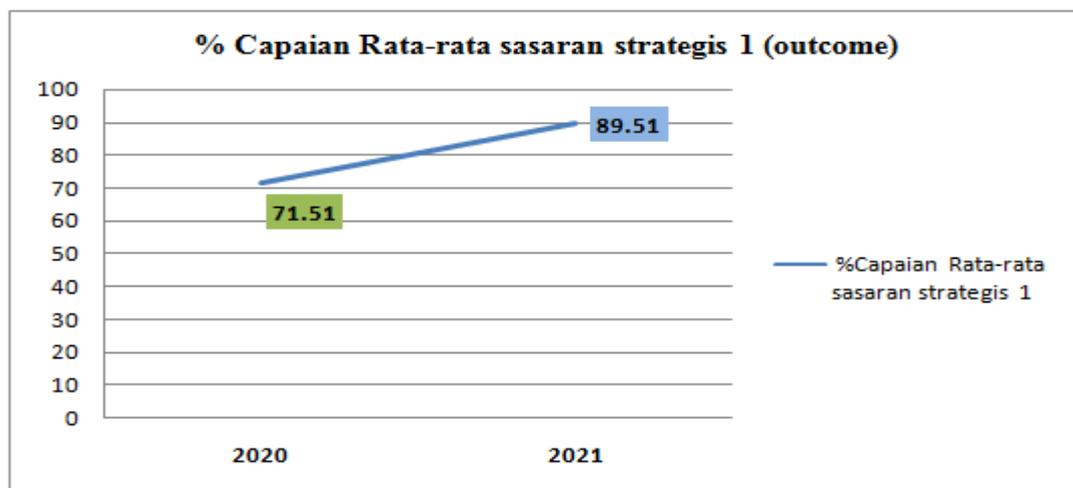
Dalam mencapai ketiga indikator kinerja di atas, banyak hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan target indikator kinerja antara lain: Belum adanya sistem informasi capaian kinerja seluruh sekolah yang saling terintegrasi dan terpadu yang dapat diakses secara cepat, tepat dan akurat. Hal tersebut mengakibatkan data capaian kinerja untuk seluruh satuan pendidikan tahun 2021 di propinsi Kalimantan Timur belum dapat diperoleh. Sedangkan hasil Assesment Kompetensi Minimal (AKM) harus menunggu data dari pusat assessment nasional karena AKM ini merupakan program baru tahun 2020 – 2024 dan pelaksanaannya bulan September - Oktober tahun 2021 mengakibatkan hasil assessment ini belum dapat diakses.

Dalam Mengukur indikator kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur ini tidak terlepas dari mata rantai pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan yang menjadi tolak ukur kinerja satuan pendidikan atas keterlaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan yang dilaksanakan secara terus menerus, konsisten dan berkelanjutan.

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam menangani hambatan dan permasalahan di atas adalah:

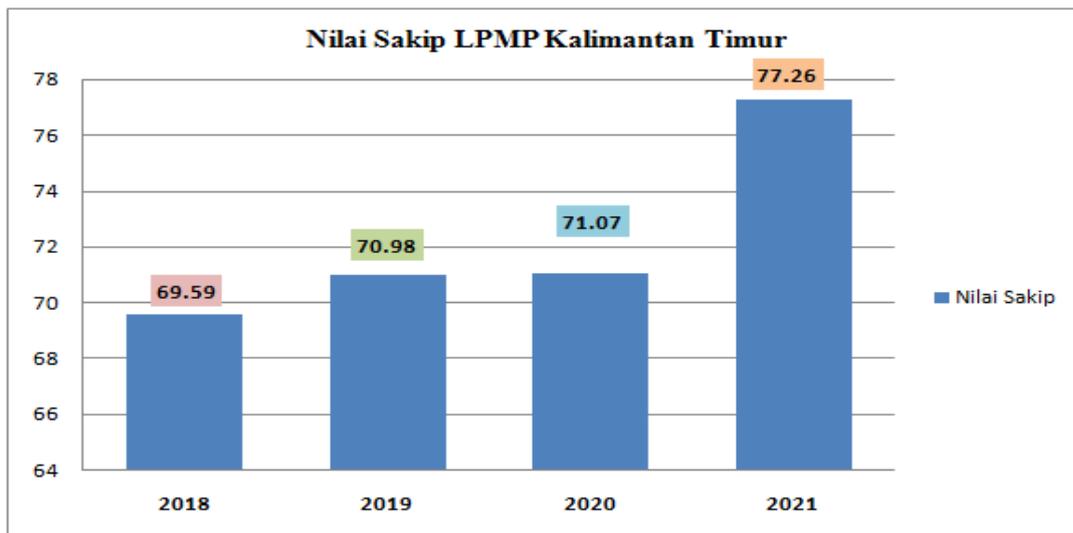
1. Koordinasi dengan satgas PMP PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tentang perlunya pengintegrasian dan pengembangan sistem informasi yang terpadu dalam satu sistem yang meliputi PMP, akreditasi sekolah, DAPODIK, AKM dan lain lain yang berkaitan dengan kinerja satuan pendidikan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PMP di satuan pendidikan sebagai bahan masukan bagi LPMP dan Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
3. Menggunakan baseline data PMP tahun 2020 dengan mengacu pada kondisi data tahun 2021.

Adapun grafik perbandingan capaian sasaran (outcome) ke-1 pada sasaran strategis Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan sebagai:



2. Terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang baik, dicapai dari indikator kinerja sebagai berikut:

### 2.1. Indikator kinerja Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur



## 2.2. Indikator kinerja Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL

Tabel. Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL tahun 2019 dan 2020, 2021

Tahun	Target Nilai Kinerja	Nilai EKA	Nilai IKPA	Total Nilai Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5	6
2019	80		98.5	99.44	Sangat Baik
2020	97	98.46	96.71	97.76	Sangat Baik
2021	97	84.72	99.2	90.51	Sangat Baik

Sumber:Aplikasi Spasikita(simproka) per tanggal 10 Januari 2022

Pada tahun 2019, 2020 LPMP Provinsi Kalimantan Timur telah meraih penghargaan dalam hal pelaksanaan kinerja anggaran.

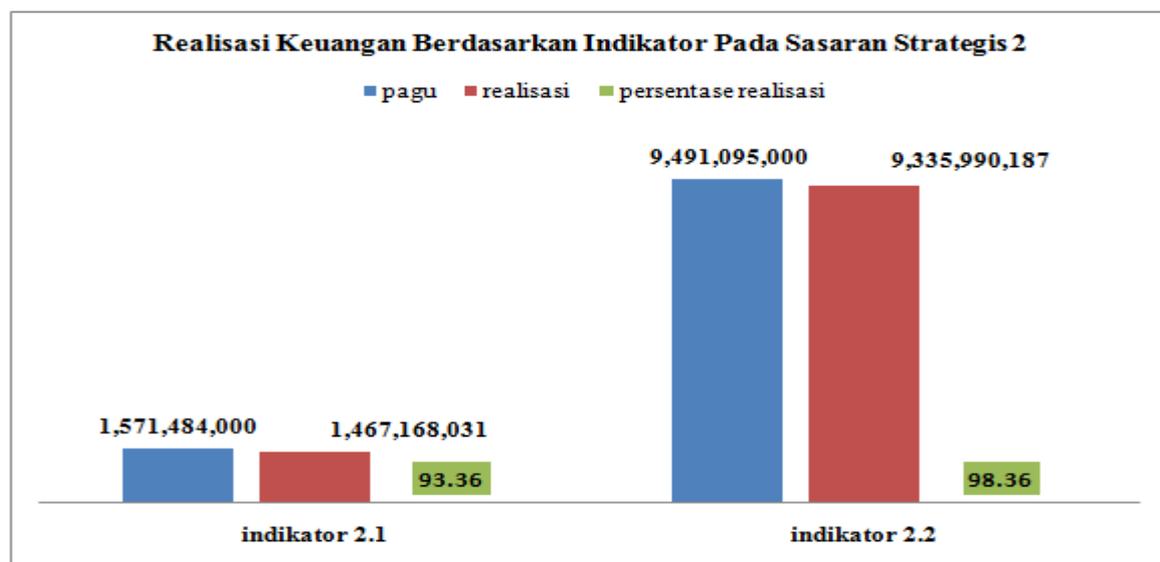
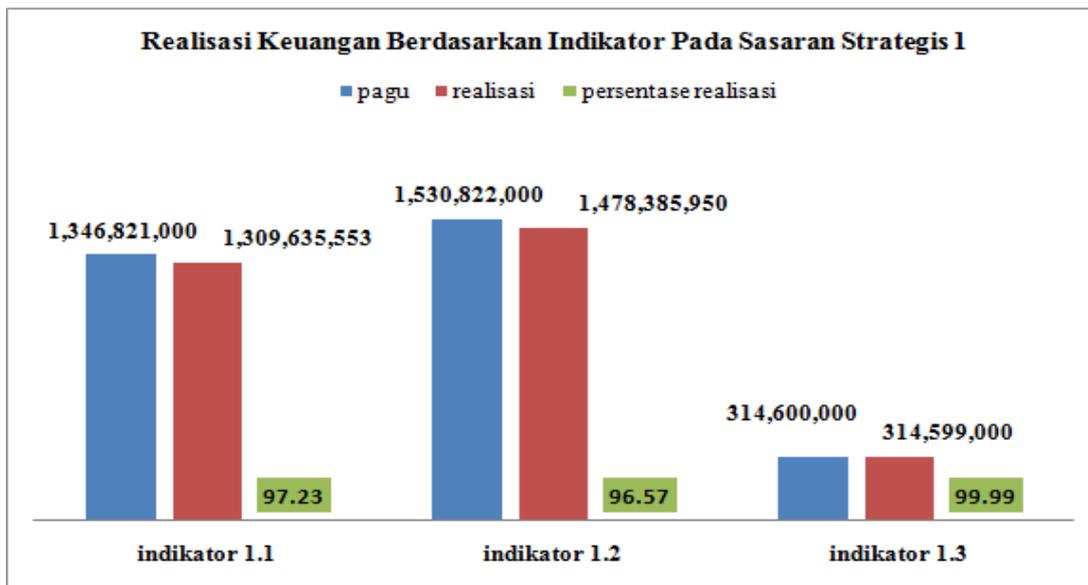


Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL LPMP Provinsi Kalimantan Timur perlu proses penjaminan mutu internal yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kinerja lembaga.

Kedua sasaran strategis di atas dicapai melalui dukungan anggaran yang memadai, dengan serapan anggaran tahun 2021 sebesar 98.22% setara dengan Rp23.279.888.717 dari pagu

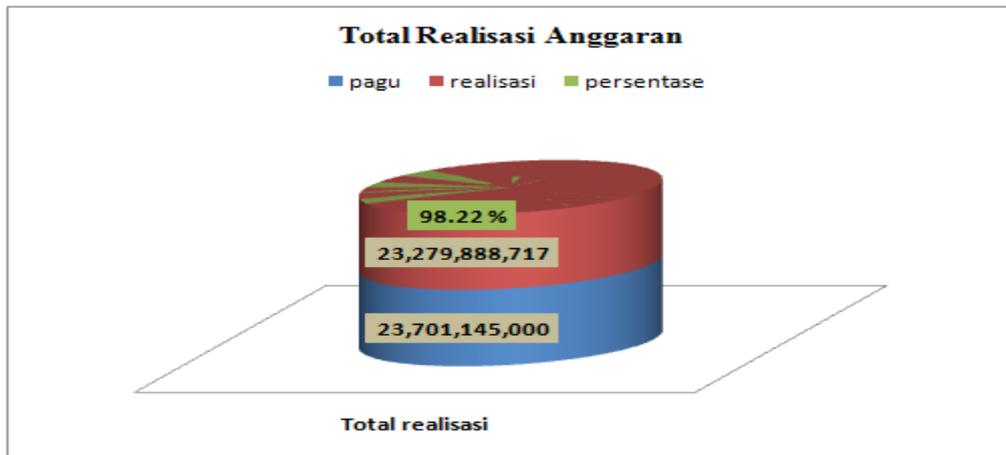
anggaran berdasarkan revisi terakhir Rp23.701.145.000. Pengukuran evaluasi proses pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi online simproka yang dikembangkan oleh biro PKLN Kemendikbudristek diperoleh nilai 90.83 atau termasuk kategori “*Sangat Baik*”.

Capaian realisasi Anggaran LPMP Kalimantan Timur berdasarkan indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja LPMP Kalimantan Timur 2021 sebagai berikut:



Sedangkan total capaian realisasi anggaran LPMP Kalimantan Timur 2021 sebagai berikut:

**Capaian Realisasi Anggaran LPMP Provinsi Kalimantan Timur  
Per Tanggal 31 Desember 2021**



Perhitungan nilai efisiensi RO satuan kerja menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:

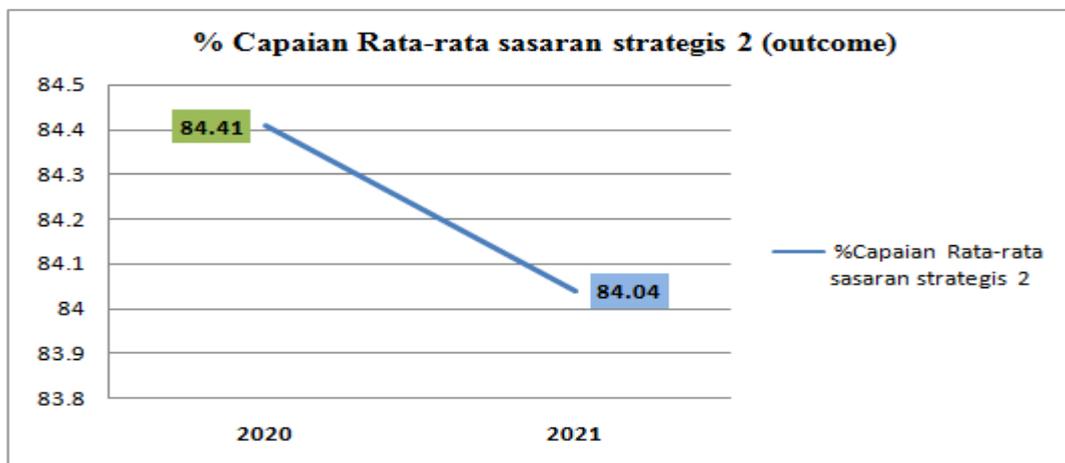
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Sumber : Permenkeu RI No.249/PMK.02/2011

Nilai efisiensi anggaran LPMP Kalimantan Timur yang diperoleh dari aplikasi simproka pertanggal 28 desember 2021 sebesar 1.79. Berdasarkan hasil dan rumus tersebut maka diperoleh hasil perhitungan nilai efisiensi RO sebesar 54.47%, hal ini menunjukkan bahwa LPMP Kalimantan Timur tahun 2021 berhasil melakukan penghematan anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran.

Adapun grafik perbandingan capaian sasaran (outcome) ke-2 pada sasaran strategis Meningkatkan tata kelola LPMP sebagai berikut:



Hambatan dalam capaian kinerja input/penyerapan anggaran disebabkan karena adanya wabah pandemi covid 19, reorganisasi kemendikbud, dan sering terjadi revisi penyesuaian pagu anggaran serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM) LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang terjadi adalah melaksanakan kegiatan secara daring, koordinasi dan meningkatkan komunikasi secara intens dengan pusat, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran serta meningkatkan kapasitas pegawai melalui kegiatan diklat SAKIP dan kegiatan diklat lainnya yang dapat menunjang kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Melalui laporan kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir resiko terhadap pencapaian tujuan sasaran strategis LPMP Provinsi Kalimantan Timur di tahun selanjutnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum



Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Timur merupakan satu dari 34 LPMP yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Dalam perjalanannya mengalami perubahan bentuk dan nama yang berpengaruh pula pada tugas dan fungsinya. Pada awalnya LPMP merupakan Balai Penataran Guru (BPG) yang didirikan pada tahun 1991 melalui SK Mendikbud Nomor 0240a/O/1991 tanggal 2 Mei 1991, dengan

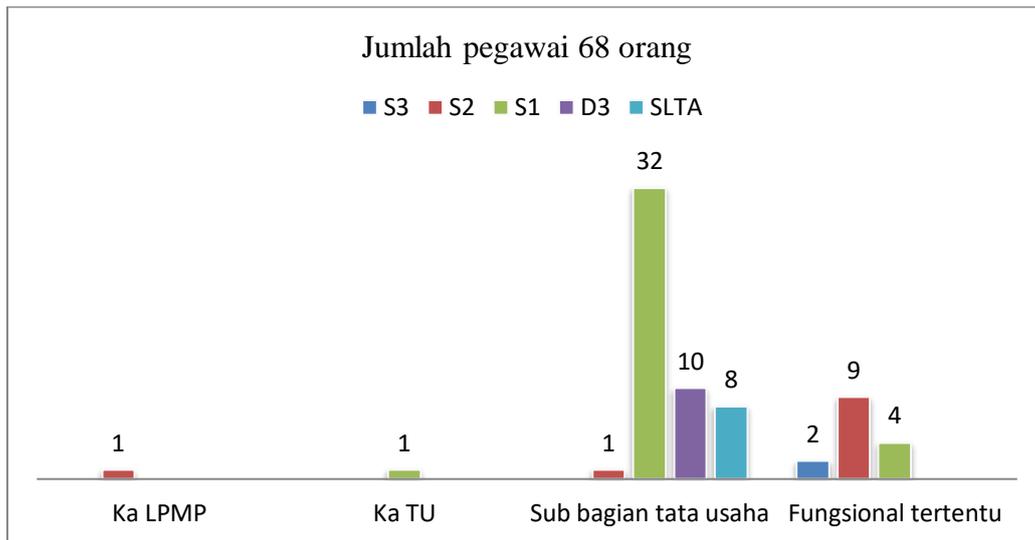
tugas dan fungsi sebagai Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Guru di provinsi bertanggung jawab langsung pada Direktorat Tenaga Kependidikan yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional memunculkan peraturan dan kebijakan untuk merefungsionalisasi dan merestrukturisasi BPG menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang tertuang pada SK Mendiknas Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003, yang selanjutnya rincian tugas LPMP diatur dalam SK Mendiknas Nomor 044/O/2004, tanggal 14 Mei 2004. LPMP mempunyai tugas sebagai penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. Sesuai Permendiknas Nomor 31 Tahun 2005 disebutkan bahwa LPMP berada di bawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK ).

Tanggal 13 Februari 2007, dengan berdasarkan pada Kepmendiknas Nomor 7 Tahun 2007, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan difungsionalisasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan maksud untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tahun 2010 LPMP berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP). Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Adapun jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

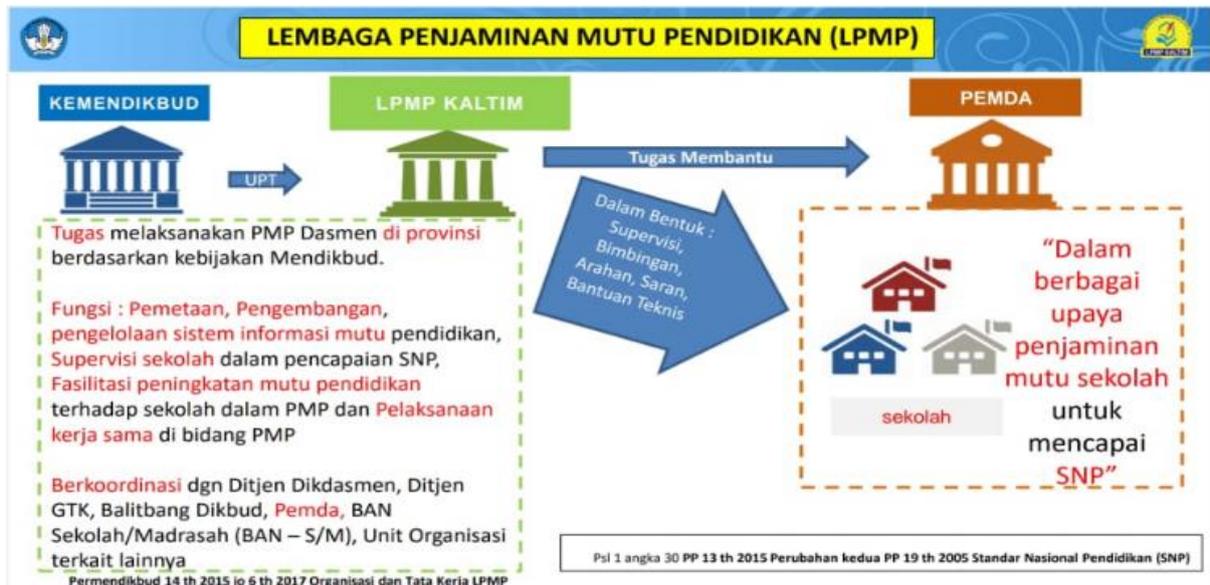
**Grafik 1.1 Sumber Daya Manusia LPMP Provinsi Kalimantan Timur**



## 1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
4. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang SAKIP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

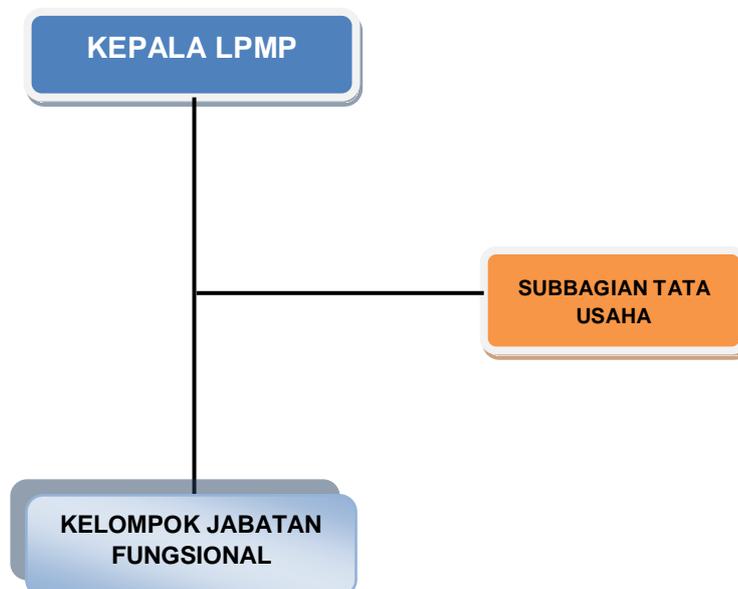
### 1.3 Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi



Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2015 Tahun 2020, struktur organisasi LPMP adalah sebagai berikut:

- a) Kepala;
- b) Subbagian Tata Usaha;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan 1.1 Struktur Organisasi LPMP Provinsi Kalimantan Timur (Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 )**

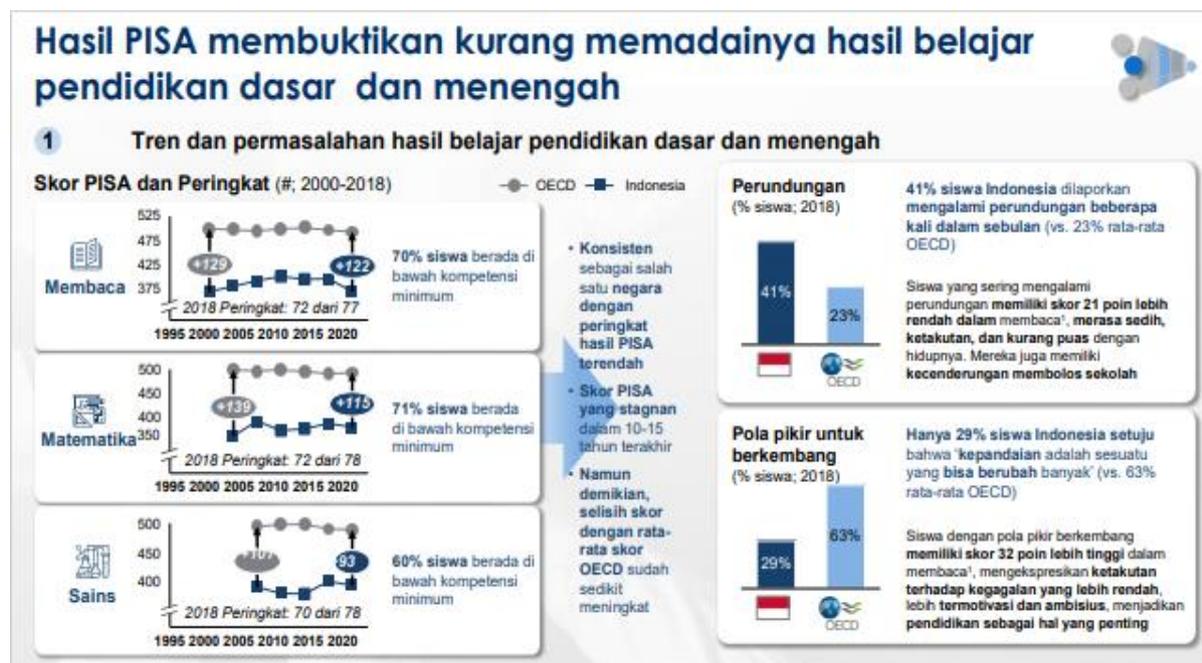


## 1.4 Isu Strategis/Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, permasalahan utama/tantangan yang dihadapi LPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi strategisnya dalam hal peningkatan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

### 1. Penguatan kompetensi literasi dan numerasi dan pendidikan karakter siswa

*Literasi* dan *numerasi* merupakan kompetensi dasar yang penting bagisiswa. *Literasi* atau *numerasi* sendiri adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau menggunakan angka-angka. Kemampuan literasi, terutama numerasi siswa di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Meskipun literasi dan numerasi tidak identik dengan pelajaran bahasa Indonesia dan Matematika. Namun setidaknya hanya dua pelajaran itu yang paling dekat digunakan untuk menggambarkan kompetensi bidang *literasi* dan *numerasi* siswa saat ini.



### 2. Peningkatan jumlah sekolah yang mencapai kategori SNP

Berdasarkan capaian rapor mutu tahun 2019 terlihat masih rendahnya sekolah sekolah dengan capaian "SNP". Hal ini menjadi tantangan untuk dapat terus di tingkatkan melalui pelaksanaan program di 2020 -2024

Jenjang	Jumlah	SNP	%
SD	1652	269	16,28
SMP	440	135	30,68
SMA	142	47	33,09
Total	2.234	451	20.18

3. Tata kelola dan pelayanan organisasi perlu di tingkatkan terus kualitasnya.

Perbaikan pemerintahan dan system manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**.

4. Kualitas data pokok pendidikan masih terus di tingkatkan

Data pokok Pendidikan (Dapodik) yang didalamnya terkandung data peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan, data substansi Pendidikan dan data sarana prasarana merupakan yang berguna sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Kualitas Dapodik ditentukan oleh tiga indikator yaitu akurat,berkelanjutan dan terbaru. Sesuai data rapor mutu Dapodik jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dihimpun oleh direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, kualitas Dapodik belum mencapai 100%. Untuk itu pemerintah mendorong semua sekolah melalui pemerintah daerah untuk melakukan input data secara akurat (wajar dan benar), melakukan sinkronisasi secara berkelanjutan, dan melakukan pemutakhiran data secara berkala.

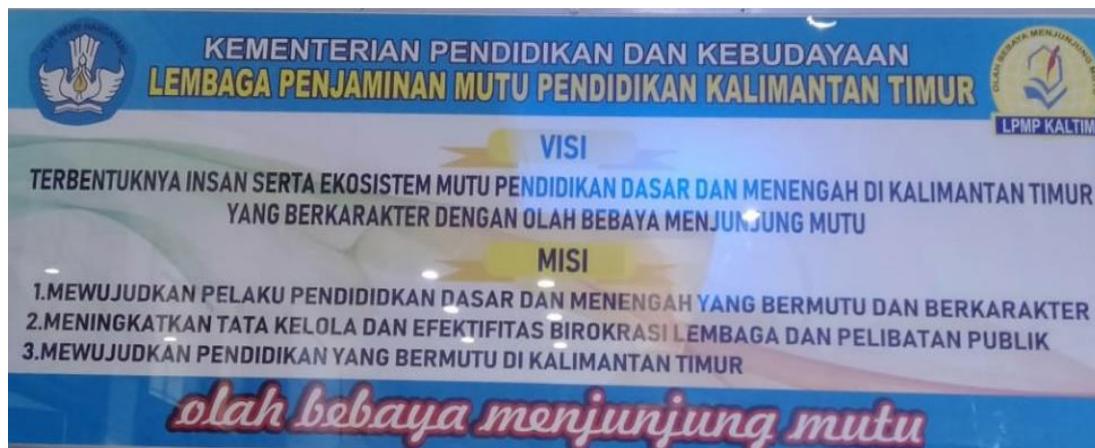
### **Peran Strategis LPMP Provinsi Kalimantan Timur**

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat eselon II, LPMP Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peran strategis baik dalam bidang Pendidikan maupun dalam tata Kelola kelembagaan. Peran strategis LPMP Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:

1. Bersama sama pemerintah daerah berupaya dalam pemenuhan 8 SNP dan peningkatan mutu pendidikan di semua satuan pendidikan.
2. Bersama sama pemerintah daerah berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan
3. Mengawal kebijakan Kemendikbud Ristek Dikti dalam implementasi didaerah sehingga berjalan sukses.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



#### Tugas:

LPMP Mempunyai Tugas Melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Kebijakan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

#### Fungsi:

1. Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
2. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Supervisi Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Dalam Pencapaian Standar Nasional Pendidikan;
4. Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Terhadap Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Pelaksanaan Kerja Sama Di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
6. Pelaksanaan Urusan Administrasi LPMP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LPMP Provinsi Kalimantan Timur dan selaras dengan sasaran program dari Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen maka LPMP Provinsi Kalimantan Timur merumuskan tujuan strategis sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Program Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dan LPMP Provinsi Kalimantan Timur**

KODE	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN STRATEGIS
TS1	Meningkatkan mutu satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB di Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai

	menengah	indeks mutu minimum 75 (kategori tinggi) sebesar 20%
<b>TS2</b>	Memperkuat sistem tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Predikat Akuntabilitas Kinerja Lembaga A

<b>TUJUAN STRATEGIS (TS1)</b>	<b>TUJUAN STRATEGI S(TS2)</b>
Meningkatkan mutu satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Memperkuat sistem tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel



<b>SASARAN STRATEGIS (SS1)</b>	<b>SASARAN STRATEGIS (SS2)</b>
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Terwujudnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang baik

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah sebagai berikut :

### Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen (1/2)

Permendikbud 45 Tahun 2019, Revisi Permendikbud No. 9 Tahun 2020

Tugas: (Pasal 79)

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang **pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.**

Fungsi: (Pasal 80)

1. **PERUMUSAN KEBIJAKAN** peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
2. **PERUMUSAN STANDAR** peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
3. **PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU** peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
4. **PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA** peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;

12

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah memiliki 4 (empat) tujuan strategis, yaitu:

1. Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas dan merata
3. Penguatan mutu dan relevansi Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpusat pada daya saing dan berkarakter
4. Penguatan sistem tata kelola Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka disusun cascading renstra Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dan LPMP berdasarkan tugas pokok dan fungsi LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan renstra Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dengan LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Adapun cascading renstra tersebut sebagai berikut :

**IKSS 2.2.** Persentase siswa dengan nilai assesment kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum.

**IKSS 2.3.** Persentase siswa dengan nilai assesment kompetensi (numerasi) memenuhi kompetensi minimum.

**IKP 3.2.1.** Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD,SD,SMP,SMA dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi).

**IKP 3.4.2.** Prsentase siswa dengan nilai survei karakter memenuhi tingkat minimum.

**IKP 3.5.4.** Persentase data pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan.

**IKP 3.6.1** Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen minimal BB

**IKK 1.1.** Persentase satuan pendidikan (jenjang SD,SMP, SMA dan SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card ) minimal 75

**IKK 1.2.** Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.

**IKK 1.3.** Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah, akurat, terbaru dan berkelanjutan.

**IKK 2.1.** Skor SAKIP predikat A

**IKK 2.2** Nilai kinerja pelaksanaan RKAKL 97

Berdasarkan cascading tersebut di atas, maka diperoleh keterkaitan tujuan strategis dan indikator kinerja program Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dan LPMP Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Pentahapan Pencapaian Renstra LPMP Provinsi Kalimantan Timur 2020 – 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD,SMP,SMA dan SLB yang memiliki indeks capaian siswa minimal 75	26,5 %	27,4%	28,3%	29,2%	30,1
		2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5 %	5%	5%	5%	5%
		3. Persentase Kab/kota yang data pokok pendidikan dasar akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95 %	95,2%	95,4%	95,6 %	95,8 %
2	Terwujudnya tata kelola lpmp yang baik	1. Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur	A	A	A	A	A
		2. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL	97	97,5	98	98,5	99

Dalam mencapai tujuan strategis, yang tertuang dalam RENSTRA LPMP Provinsi Kalimantan Timur 2020 – 2024, maka LPMP Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target tahunan yang akan dicapai melalui Perjanjian Kinerja tahun 2021. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

**Tabel 2.3 Target Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

**Target Kinerja**

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	24.7
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
		[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95.2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 20.585.507.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 6.052.079.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 26.637.586.000</b>

Jakarta, 29 Januari 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

**Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**



**Jumeri, S.TP., M.Si.**



**Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.**

Total jumlah anggaran kegiatan peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SLB berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal adalah Rp26.637.586.000 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Pada bulan Oktober 2021 terjadi perubahan kepala satker LPMP Kalimantan Timur, seiring dengan hal tersebut maka terjadi revisi Perjanjian kinerja LPMP Kalimantan Timur tahun 2021 dengan pagu anggaran hasil revisi terakhir adalah sebesar Rp23.701.145.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Adapun Revisi Perjanjian Kinerja LPMP Kalimantan Timur tahun 2021 sebagai berikut:



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur  
Dengan  
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Dr.Khairullah, S.Pd,M.Pd**

**Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda,29 November 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah**

**Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**

**Jumeri, S.TP.,M.Si.**

**Dr.Khairullah, S.Pd,M.Pd**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	24.7
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
		[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95.2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 19.968.896.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 3.732.249.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 23.701.145.000</b>

Samarinda, 29 November 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

**Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**



**Jumeri, S.TP., M.Si.**



**Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd**

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

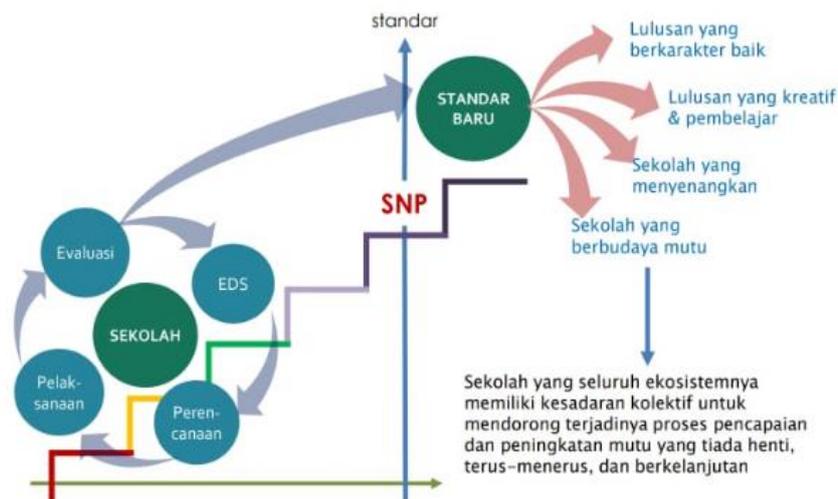
#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2021, LPMP Provinsi Kalimantan Timur menetapkan dua sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja. Upaya LPMP Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dilakukan melalui kegiatan : pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi mutu pendidikan, monitoring dan evaluasi hasil pemetaan mutu pendidikan, dan fasilitasi satuan pendidikan sesuai delapan Standar Nasional Pendidikan dengan metode: pembinaan, penguatan, pembimbingan, dan pendampingan terhadap SDM pemerintah daerah dalam implementasi SPMI dan SPME. Oleh karena itu untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diamanatkan maka setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perlu diketahui tingkat ketercapaiannya. Adapun perealisasi dari masing-masing sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut:

#### **Sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan**

Ketercapaian sasaran strategis “*meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan*” didukung melalui ketercapaian 6 indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75;
2. Persentase Satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75;
3. Persentase Satuan pendidikan jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75;
4. Persentase Satuan pendidikan jenjang SLB yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75;
5. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.
6. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan;



**Gambar3.1 Makna SPMI**

Adapun hasil capaian indikator kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2021 sebagai berikut :

**1. Persentase Satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75**

Dalam menentukan persentase satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75, menggunakan pendekatan nilai rapot mutu sekolah dari aplikasi PMP tahun 2020 berdasarkan update data tahun 2021 (baseline data berasal dari nilai kinerja sekolah laman penjaminan mutu pendidikan tahun sebelumnya) ditetapkan ambang batas kinerja terburuk 6,13 dan ambang batas kinerja terbaik 6,75. Score card yang diterapkan di Satuan Pendidikan ini merupakan sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola, meliputi indikator AKM dan survey karakter, rapot mutu, kompetensi kualifikasi guru, dan tata kelola sekolah). Nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 ini masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Berdasarkan pedoman penskoran, masing-masing aspek dikonversi ke dalam kriteria kuantitatif dengan mengacu pada pedoman konversi skor dalam nilai pada skala 5 (Eko Putro Widoyoko S, 2014:238). Adapun pedoman penskoran sebagai berikut :

No	Nilai Kinerja	Nilai SNP	Kategori
1.	$80 \leq x$	6,67 - 7	Sangat baik
2.	$75 \leq x < 80$	5,07 – 6,66	Baik
3.	$70 \leq x < 75$	3,71 – 5,06	Cukup

4.	$65 \leq x < 70$	2,05 – 3,70	Kurang
5.	$X < 65$	0 – 2,04	Sangat kurang

Adapun batasan capaian SNP berdasarkan aplikasi PMP 2020 adalah sebagai berikut :

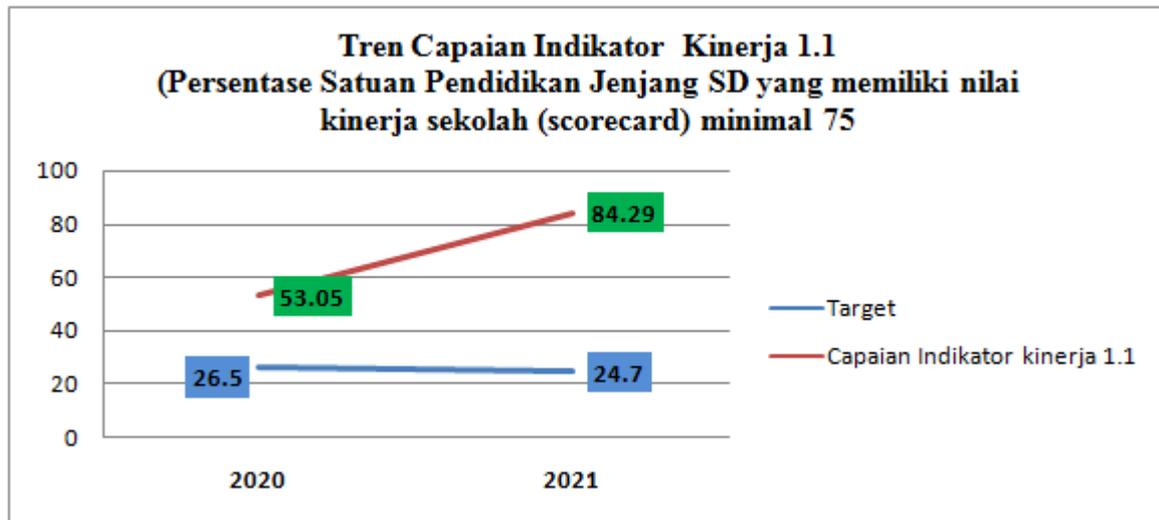
Deskripsi	Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
★★★★★	SNP	6,67	7
★★★★	Menuju SNP 4 (M4)	5,07	6,66
★★★	Menuju SNP 3 (M3)	3,71	5,06
★★	Menuju SNP 2 (M2)	2,05	3,70
★	Menuju SNP 1 (M1)	0	2,04

Jumlah Rapor Mutu

Berdasarkan data PMP 2020 update data tahun 2021 satuan pendidikan yang memiliki capaian SNP 0 - 5,06 yakni dengan kategori menuju SNP 3, menuju SNP 2, menuju SNP 1 adalah satuan pendidikan yang memiliki kinerja terburuk. Sedangkan satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik adalah satuan pendidikan yang memiliki capaian SNP 5,07 – 7 yakni dengan kategori menuju SNP 4 dan mencapai SNP 7. Jumlah satuan pendidikan SD yang memiliki kinerja terbaik adalah terdapat 1.197 satuan pendidikan dari 1.420 satuan pendidikan yang telah mengirimkan data mutunya dengan persentase capaian 84,29 %. Persentase ini berada di atas target 24.7 %. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan SD sebagian besar telah menunjukkan kinerja yang baik. Sedangkan jumlah satuan pendidikan SD yang berkinerja terburuk adalah 223 sekolah dari 1.420 dengan persentase capaian 15,70 %. Hal ini di sebabkan karena sekolah tersebut masih belum memahami penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan internal yang ada di sekolah, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah berdasarkan 8 SNP. Total jumlah satuan pendidikan SD di propinsi Kalimantan Timur adalah 1902 satuan pendidikan jadi masih terdapat 482 satuan pendidikan yang belum mengirimkan data mutunya kedalam aplikasi PMP 2020 hal ini disebabkan masih belum optimalnya aplikasi PMP di sekolah menyebabkan masih banyak sekolah yang belum terkirim data mutunya.



Adapun grafik tren hasil capaian indikator kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur, persentase satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai berikut:

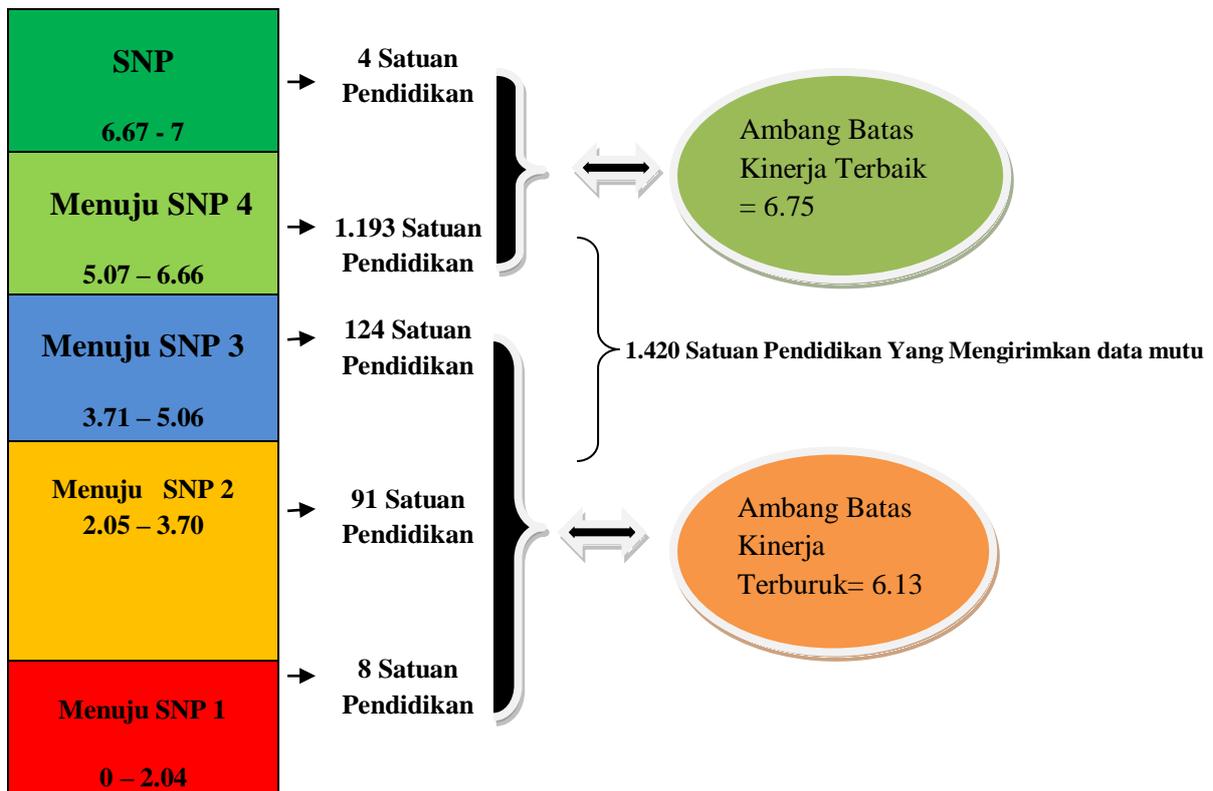


Capaian indikator 1.1 (Persentase Satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75) berdasarkan tahun 2020 dan tahun 2021 serta perbandingannya dengan target akhir Renstra melalui tabel berikut ini:

Realisasi (%) 2020	Tahun 2021			Target Renstra 2021	Capaian Terhadap Renstra 2021
	Target PK (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
53.05 %	24.7 %	84.29 %	84.29%	27.4 %	84.29 %

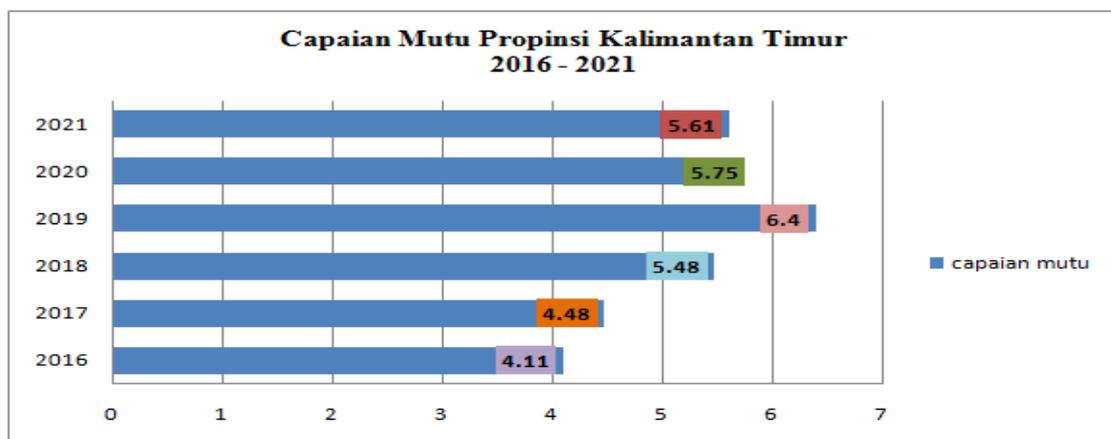
Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Persentase Satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75, pada tahun 2020 terealisasi 53.05 % sedangkan pada tahun 2021 terealisasi 84,29 %. Realisasi pada tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepala LPMP Kalimantan Timur 2021 dan juga melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra LPMP Kalimantan Timur tahun 2021 yakni 27.4 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja LPMP Kalimantan Timur 2021 dalam mengukur ketercapaian indikator Persentase Satuan Pendidikan Jenjang SD yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 melebihi target dan meningkat secara signifikan.

**Rata – rata capaian SNP SD 2021 (baseline data PMP 2020)**



Pada saat proses SPMI dilakukan dengan baik dan benar maka akan menunjukkan hasil yang konsisten.

Berikut grafik tren potret mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil capaian SNP tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019, 2020 dan 2021 untuk seluruh jenjang SD yang diperoleh dari aplikasi PMP online sebagai berikut :



Grafik. Capaian Mutu SD Propinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan raport mutu sekolah (Satuan Pendidikan jenjang SD) yang terdapat dalam aplikasi PMP online dari tahun 2016 – 2019 capaian mutu sekolah mengalami kenaikan kemudian pada tahun 2020 dan 2021 capaian mutu sekolah cenderung mengalami penurunan karena pada dasarnya sekolah telah mengisi aplikasi PMP berdasarkan keadaan riil di satuan pendidikan, namun tahun sebelumnya satuan pendidikan mengisi PMP menyerahkan sepenuhnya kepada operator sekolah dan bahkan satuan pendidikan telah menyadari betapa pentingnya pengisian raport mutu pendidikan sebagai bahan evaluasi diri sekolah dalam menyusun RKS.

**1. Persentase Satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75**

Dalam menentukan persentase satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75, menggunakan pendekatan nilai raport mutu sekolah dari aplikasi PMP tahun 2020 berdasarkan update data tahun 2021 (baseline data berasal dari nilai kinerja sekolah laman penjaminan mutu pendidikan tahun sebelumnya) ditetapkan ambang batas kinerja terburuk 6,13 dan ambang batas kinerja terbaik 6,75. Score card yang diterapkan di Satuan Pendidikan ini merupakan sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola, meliputi indicator AKM dan survey karakter, raport mutu, kompetensi kualifikasi guru, dan tata kelola sekolah). Nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 ini masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Berdasarkan pedoman penskoran, masing-masing aspek dikonversi ke dalam kriteria kuantitatif dengan mengacu pada pedoman konversi skor dalam nilai pada skala 5 ( **Eko Putro Widoyoko S, 2014:238**). Adapun pedoman penskoran sebagai berikut :

No	Nilai Kinerja	Nilai SNP	Kategori
1.	$80 \leq x$	6,67 - 7	Sangat baik
2.	$75 \leq x < 80$	5,07 – 6,66	Baik
3.	$70 \leq x < 75$	3,71 – 5,06	Cukup
4.	$65 \leq x < 70$	2,05 – 3,70	Kurang
5.	$X < 65$	0 – 2,04	Sangat kurang

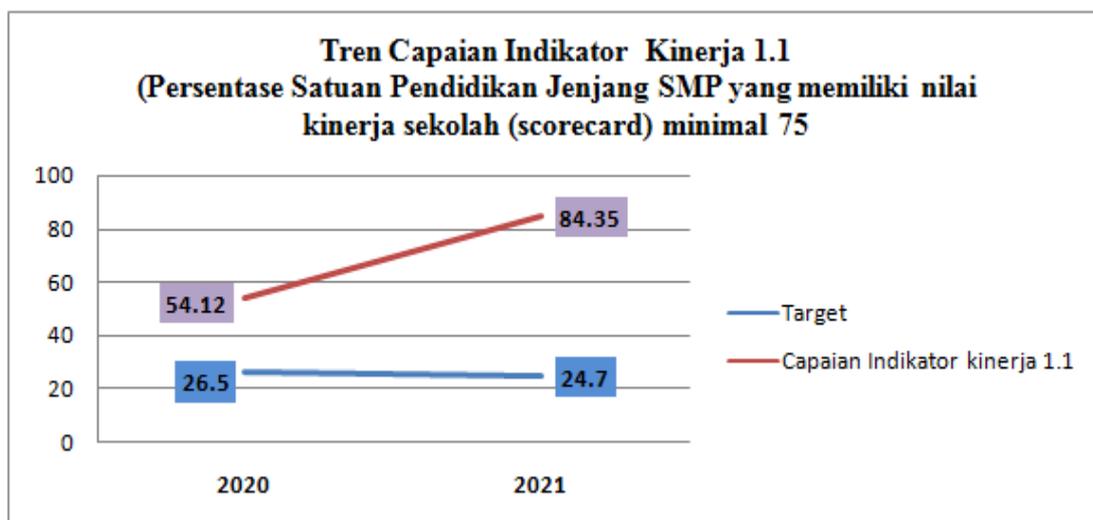
Adapun batasan capaian SNP berdasarkan aplikasi PMP 2020 adalah sebagai berikut :

Deskripsi	Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
★★★★★	SNP	6,67	7
★★★★	Menuju SNP 4 (M4)	5,07	6,66
★★★	Menuju SNP 3 (M3)	3,71	5,06
★★	Menuju SNP 2 (M2)	2,05	3,70
★	Menuju SNP 1 (M1)	0	2,04

Jumlah Rapor Mutu

Berdasarkan data PMP 2020 satuan pendidikan yang memiliki capaian SNP 0 - 5,06 yakni dengan kategori menuju SNP 3, menuju SNP 2, menuju SNP 1 adalah satuan pendidikan yang memiliki kinerja terburuk. Sedangkan satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik adalah satuan pendidikan yang memiliki capaian SNP 5,07 – 7 yakni dengan kategori menuju SNP 4 dan mencapai SNP 7. Jumlah satuan pendidikan SMP yang memiliki kinerja terbaik adalah terdapat 399 satuan pendidikan dari 473 satuan pendidikan yang telah mengirimkan data mutunya, dengan persentase capaian 84,35 %. Persentase ini berada di atas target 24,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan SMP sebagian besar telah menunjukkan kinerja yang baik. Sedangkan jumlah satuan pendidikan SMP yang berkinerja terburuk adalah 74 sekolah dari 473 dengan persentase capaian 15,64 %. Hal ini di sebabkan karena sekolah tersebut masih belum memahami penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan internal yang ada di sekolah, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah berdasarkan 8 SNP. Total jumlah satuan pendidikan SMP di propinsi Kalimantan Timur adalah 673 satuan pendidikan jadi masih terdapat 200 satuan pendidikan yang belum mengirimkan data mutunya kedalam aplikasi PMP 2020 hal ini disebabkan masih belum optimalnya aplikasi PMP di sekolah menyebabkan masih banyak sekolah yang belum terkirim data mutunya..

Adapun grafik tren hasil capaian indikator kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur, persentase satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai berikut:

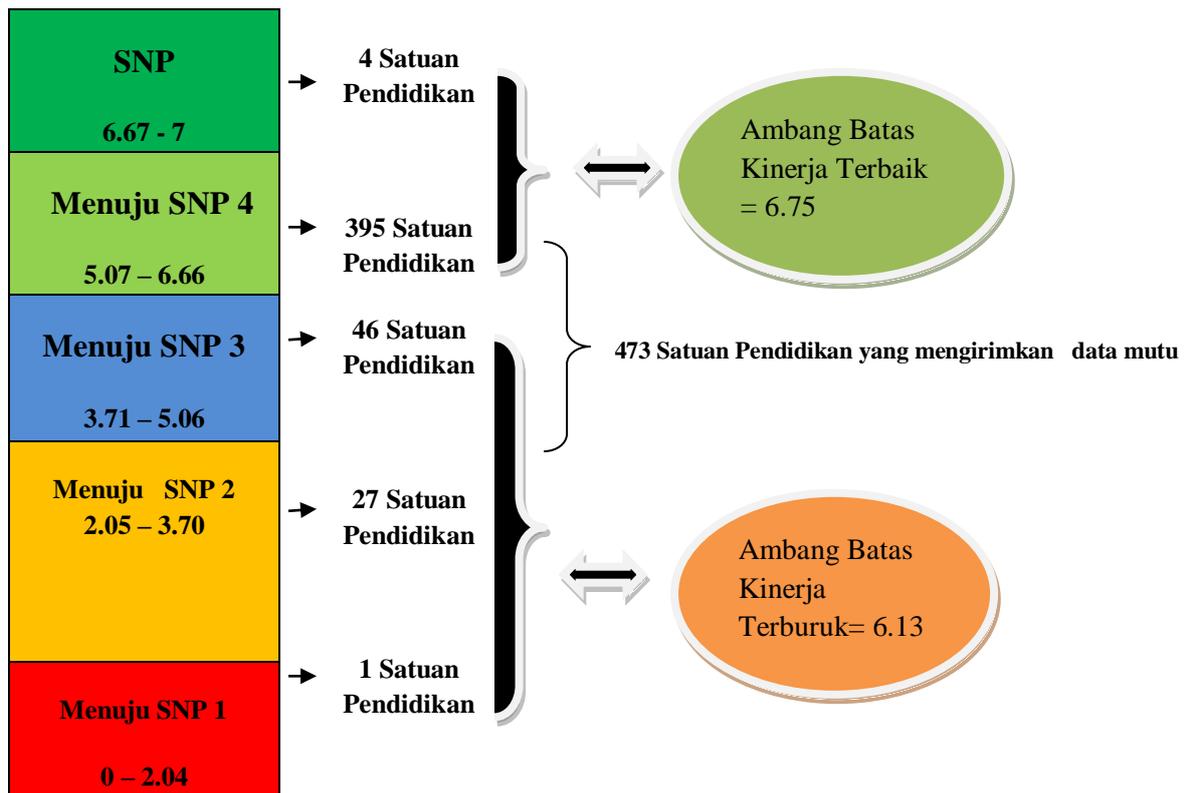


Capaian indikator 1.1 (Persentase Satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75) berdasarkan tahun 2020 dan tahun 2021 serta perbandingannya dengan target akhir Renstra melalui tabel berikut ini:

Realisasi (%) 2020	Tahun 2021			Target Renstra 2021	Capaian Terhadap Renstra 2021
	Target PK (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
54.12 %	24.7 %	84.35 %	84.35%	27.4 %	84.35 %

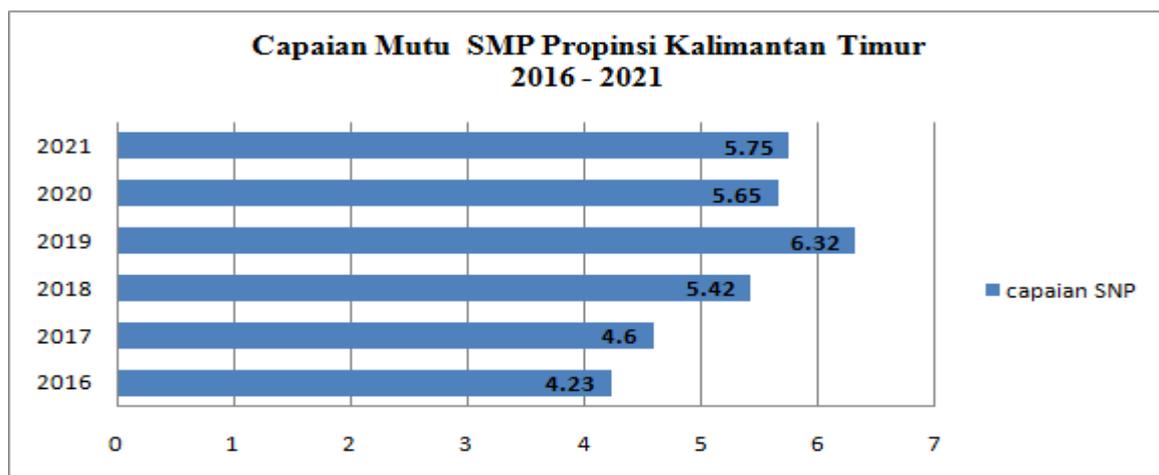
Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Persentase Satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75, pada tahun 2020 terealisasi 54.12 % sedangkan pada tahun 2021 terealisasi 84,35 %. Realisasi pada tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepala LPMP Kalimantan Timur 2021 dan juga melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra LPMP Kalimantan Timur tahun 2021 yakni 27.4 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja LPMP Kalimantan Timur 2021 dalam mengukur ketercapaian indikator Persentase Satuan Pendidikan Jenjang SMP yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 melebihi target dan meningkat secara signifikan.

**Rata – rata capaian SNP SMP 2021 (baseline data PMP 2020)**



Pada saat proses SPMI dilakukan dengan baik dan benar maka akan menunjukkan hasil yang konsisten.

Berikut grafik tren potret mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil capaian SNP tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019, 2020 dan 2021 untuk seluruh jenjang SMP yang diperoleh dari aplikasi PMP online sebagai berikut :



Grafik. Capaian Mutu SMP Propinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan raport mutu sekolah yang terdapat dalam aplikasi PMP online dari tahun 2016 – 2019 capaian mutu SMP mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2020 capaian mutu sekolah cenderung mengalami penurunan karena pada dasarnya sekolah telah mengisi aplikasi PMP berdasarkan keadaan riil di satuan pendidikan, namun tahun sebelumnya satuan pendidikan mengisi PMP menyerahkan sepenuhnya kepada operator sekolah dan bahkan satuan pendidikan telah menyadari betapa pentingnya pengisian raport mutu pendidikan sebagai bahan evaluasi diri sekolah dalam menyusun RKS. Pada tahun 2021 ini capaian mutu SMP mengalami kenaikan lagi dari tahun 2020 hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan untuk tingkat SMP mengalami peningkatan berdasarkan baseline data mutu tahun 2020 yang diupdate sampai tahun 2021.



### 3. Persentase Satuan pendidikan jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75

Dalam menentukan persentase satuan pendidikan jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75, menggunakan pendekatan nilai raport mutu sekolah dari aplikasi PMP tahun 2020 berdasarkan update data tahun 2021 (baseline data berasal dari nilai kinerja sekolah laman penjaminan mutu pendidikan tahun sebelumnya) ditetapkan ambang batas kinerja terburuk 6,13 dan ambang batas kinerja terbaik 6,75. Score card yang diterapkan di Satuan Pendidikan ini merupakan sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola, meliputi indikator AKM dan survey karakter, raport mutu, kompetensi kualifikasi guru, dan tata kelola sekolah). Nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 ini masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Berdasarkan pedoman penskoran, masing-masing aspek dikonversi ke dalam kriteria kuantitatif dengan mengacu pada pedoman konversi skor dalam nilai pada skala 5 ( **Eko Putro Widoyoko S, 2014:238**). Adapun pedoman penskoran sebagai berikut :

No	Nilai Kinerja	Nilai SNP	Kategori
1.	$80 \leq x$	6,67 - 7	Sangat baik
2.	$75 \leq x < 80$	5,07 – 6,66	Baik

3.	$70 \leq x < 75$	3,71 – 5,06	Cukup
4.	$65 \leq x < 70$	2,05 – 3,70	Kurang
5.	$X < 65$	0 – 2,04	Sangat kurang

Adapun batasan capaian SNP berdasarkan aplikasi PMP 2020 adalah sebagai berikut :

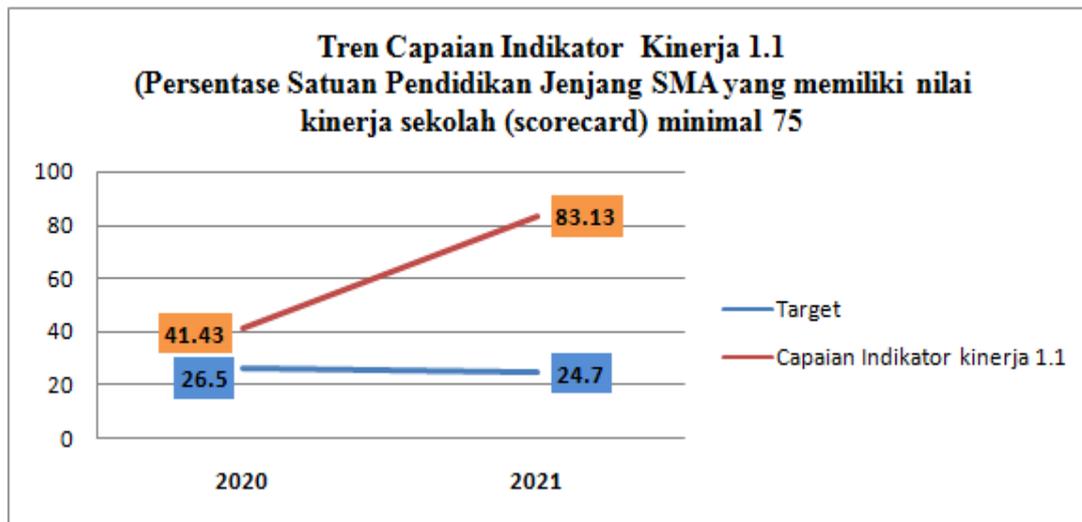
Deskripsi	Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
★★★★★	SNP	6,67	7
★★★★	Menuju SNP 4 (M4)	5,07	6,66
★★★	Menuju SNP 3 (M3)	3,71	5,06
★★	Menuju SNP 2 (M2)	2,05	3,70
★	Menuju SNP 1 (M1)	0	2,04

Jumlah Rapor Mutu

Berdasarkan data PMP 2020 satuan pendidikan yang memiliki capaian SNP 0 - 5,06 yakni dengan kategori menuju SNP 3, menuju SNP 2, menuju SNP 1 adalah satuan pendidikan yang memiliki kinerja terburuk. Sedangkan satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik adalah satuan pendidikan yang memiliki capaian SNP 5,07 – 7 yakni dengan kategori menuju SNP 4 dan mencapai SNP 7. Jumlah satuan pendidikan SMA yang memiliki kinerja terbaik adalah terdapat 143 satuan pendidikan dari 172 satuan pendidikan yang telah mengirimkan data mutunya dengan persentase capaian 83,13 %. Persentase ini berada di atas target 24,7%. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan SMA sebagian besar telah menunjukkan kinerja yang baik. Sedangkan jumlah satuan pendidikan SMA yang berkinerja terburuk adalah 29 sekolah dari 143 satuan pendidikan yang telah mengirimkan data mutunya dengan persentase capaian 15,64 %. Hal ini disebabkan karena sekolah tersebut masih belum memahami penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan internal yang ada di sekolah, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah berdasarkan 8 SNP. Total jumlah satuan pendidikan SMA di propinsi Kalimantan Timur adalah 229 satuan pendidikan jadi masih terdapat 57 satuan pendidikan yang belum mengirimkan data mutunya kedalam aplikasi PMP 2020 hal ini disebabkan masih belum optimalnya aplikasi PMP di sekolah menyebabkan masih banyak sekolah yang belum terkirim data mutunya.



Adapun grafik tren hasil capaian indikator kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur, persentase satuan pendidikan jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai berikut:

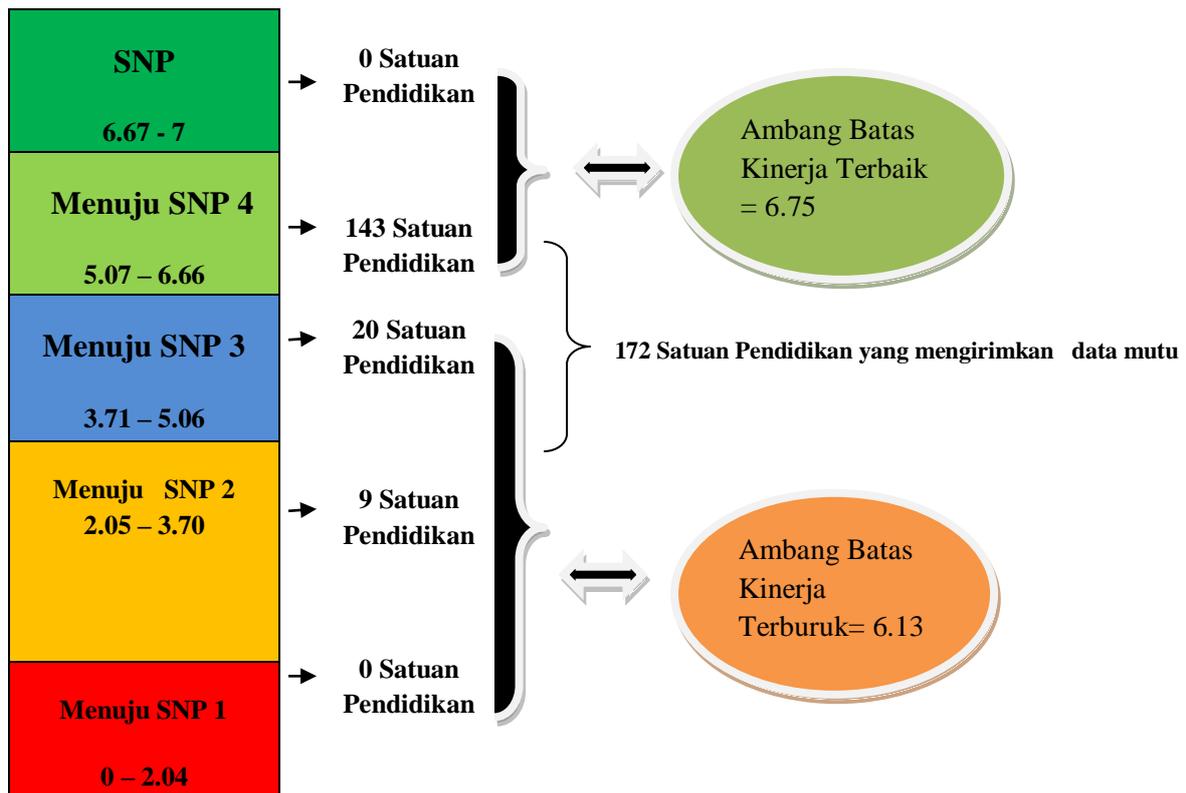


Capaian indikator 1.1 (Persentase Satuan pendidikan jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75) berdasarkan tahun 2020 dan tahun 2021 serta perbandingan dengan target akhir Renstra melalui tabel berikut ini:

Realisasi (%) 2020	Tahun 2021			Target Renstra 2021	Capaian Terhadap Renstra 2021
	Target PK (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
41.43 %	24.7 %	83.13 %	83.13%	27.4 %	83.13 %

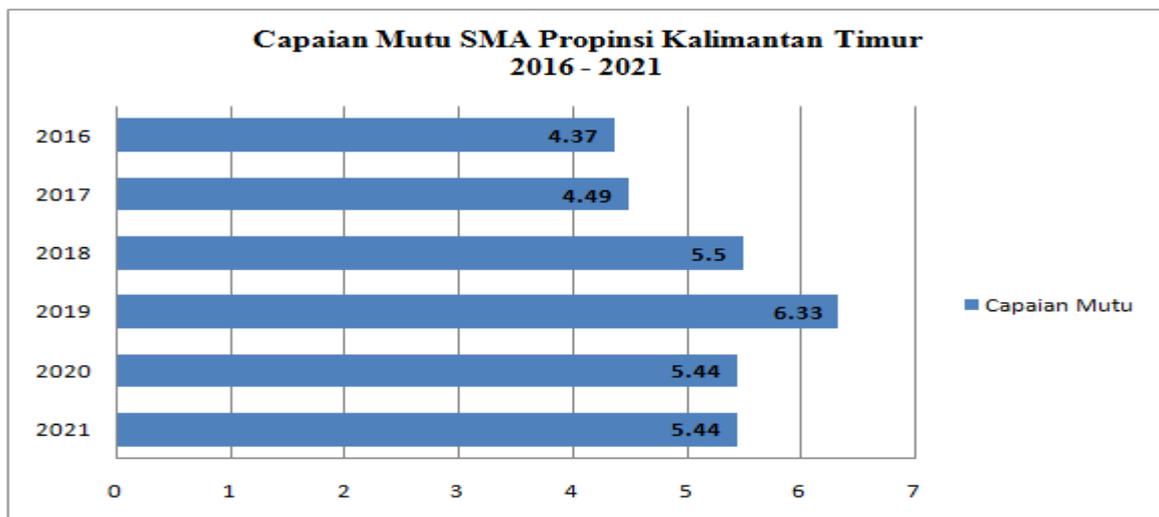
Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Persentase Satuan pendidikan jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75, pada tahun 2020 terealisasi 41.43 % sedangkan pada tahun 2021 terealisasi 83,13 %. Realisasi pada tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepala LPMP Kalimantan Timur 2021 dan juga melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra LPMP Kalimantan Timur tahun 2021 yakni 27.4 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja LPMP Kalimantan Timur 2021 dalam mengukur ketercapaian indikator Persentase Satuan Pendidikan Jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 melebihi target dan meningkat secara signifikan.

**Rata – rata capaian SNP SMA 2021 (baseline data PMP 2020)**



Pada saat proses SPMI dilakukan dengan baik dan benar maka akan menunjukkan hasil yang konsisten.

Berikut grafik tren potret mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil capaian SNP tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019, 2020 dan 2021 untuk seluruh jenjang SMA yang diperoleh dari aplikasi PMP online sebagai berikut :



Grafik. Capaian Mutu SMA Propinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan rapot mutu sekolah yang terdapat dalam aplikasi PMP online dari tahun 2016 – 2019, capaian mutu SMA meningkat, kemudian pada tahun 2020 capaian mutu sekolah cenderung mengalami penurunan karena pada dasarnya sekolah telah mengisi aplikasi PMP berdasarkan keadaan riil di satuan pendidikan, jika tahun sebelumnya satuan pendidikan mengisi PMP menyerahkan sepenuhnya kepada operator sekolah dan bahkan satuan pendidikan telah menyadari betapa pentingnya pengisian rapot mutu pendidikan sebagai bahan evaluasi diri sekolah dalam menyusun RKS. Pada tahun 2021 ini capaian mutu SMA mengalami kenaikan lagi dari tahun 2020 hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan untuk tingkat SMA mengalami peningkatan berdasarkan baseline data mutu tahun 2020 yang diupdate sampai tahun 2021.

**4. Persentase Satuan pendidikan jenjang SLB yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75**



Dalam menentukan persentase satuan pendidikan jenjang SLB yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75, menggunakan pendekatan nilai rapot mutu sekolah dari aplikasi PMP tahun 2020 berdasarkan update data tahun 2021 (baseline data berasal dari nilai kinerja sekolah laman penjaminan mutu pendidikan tahun sebelumnya) ditetapkan ambang batas kinerja terburuk 6,13 dan ambang batas kinerja terbaik 6,75. Score card yang diterapkan di Satuan Pendidikan ini merupakan sistem penilaian kinerja yang komprehensif (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, tatakelola, meliputi indikator AKM dan survey karakter, rapot mutu, kompetensi kualifikasi guru, dan tata kelola sekolah). Nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 ini masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Berdasarkan pedoman penskoran, masing-masing aspek dikonversi ke dalam kriteria kuantitatif dengan mengacu pada pedoman konversi skor dalam nilai pada skala 5 ( **Eko Putro Widoyoko S, 2014:238**). Adapun pedoman penskoran sebagai berikut :

No	Nilai Kinerja	Nilai SNP	Kategori
1.	$80 \leq x$	6,67 - 7	Sangat baik

2.	$75 \leq x < 80$	5,07 – 6,66	Baik
3.	$70 \leq x < 75$	3,71 – 5,06	Cukup
4.	$65 \leq x < 70$	2,05 – 3,70	Kurang
5.	$X < 65$	0 – 2,04	Sangat kurang

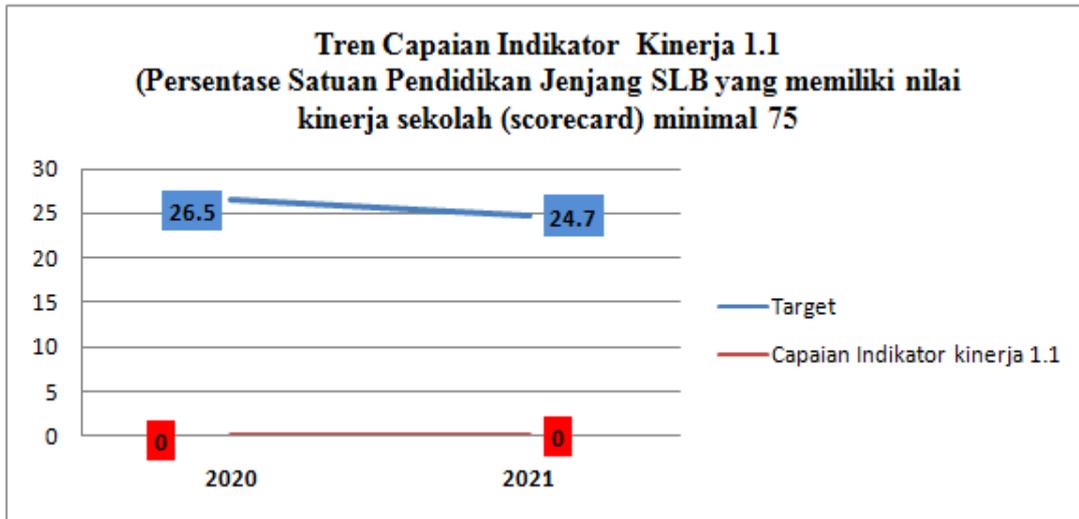
Adapun batasan capaian SNP berdasarkan aplikasi PMP 2020 adalah sebagai berikut :

Deskripsi	Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
★★★★★	SNP	6,67	7
★★★★	Menuju SNP 4 (M4)	5,07	6,66
★★★	Menuju SNP 3 (M3)	3,71	5,06
★★	Menuju SNP 2 (M2)	2,05	3,70
★	Menuju SNP 1 (M1)	0	2,04

Jumlah Rapor Mutu

Berdasarkan data PMP 2020 satuan pendidikan yang memiliki capaian SNP 0 - 5,06 yakni dengan kategori menuju SNP 3, menuju SNP 2, menuju SNP 1 adalah satuan pendidikan yang memiliki kinerja terburuk. Sedangkan satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik adalah satuan pendidikan yang memiliki capaian SNP 5,07 – 7 yakni dengan kategori menuju SNP 4 dan mencapai SNP 7. Jumlah satuan pendidikan SLB yang memiliki kinerja terbaik adalah terdapat 0 satuan pendidikan dari 15 satuan pendidikan yang telah mengirimkan data mutunya yakni 11 satuan pendidikan capaian mutunya menuju SNP 3 dengan rentang nilai 3.71 – 5.06 dan 4 satuan pendidikan dengan capaian mutu menuju SNP 1 dengan rentang nilai 0 – 2.04. Jadi persentase capaian mutu SLB ini masih 0 %. Persentase ini jauh berada di bawah target 24.7 %. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan SLB ini pada tahun 2020 belum terdaftar ke dalam sistem aplikasi PMP dan SLB sebelumnya tidak pernah masuk kedalam program LPMP. Sedangkan jumlah satuan pendidikan SLB yang berkinerja terburuk adalah 15 sekolah dari 15 satuan pendidikan yang telah mengirimkan data mutunya dengan persentase capaian 100 %. Hal ini disebabkan karena sekolah tersebut masih belum memahami penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan internal yang ada di sekolah, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah berdasarkan 8 SNP. Total jumlah satuan pendidikan SLB di propinsi Kalimantan Timur adalah 37 satuan pendidikan jadi masih terdapat pula 22 satuan pendidikan yang belum mengirimkan data mutunya kedalam aplikasi PMP 2020 hal ini disebabkan masih belum optimalnya aplikasi PMP di sekolah menyebabkan masih banyak sekolah yang belum terkirim data mutunya.

Adapun grafik tren hasil capaian indikator kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur, persentase satuan pendidikan jenjang SLB yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai berikut:

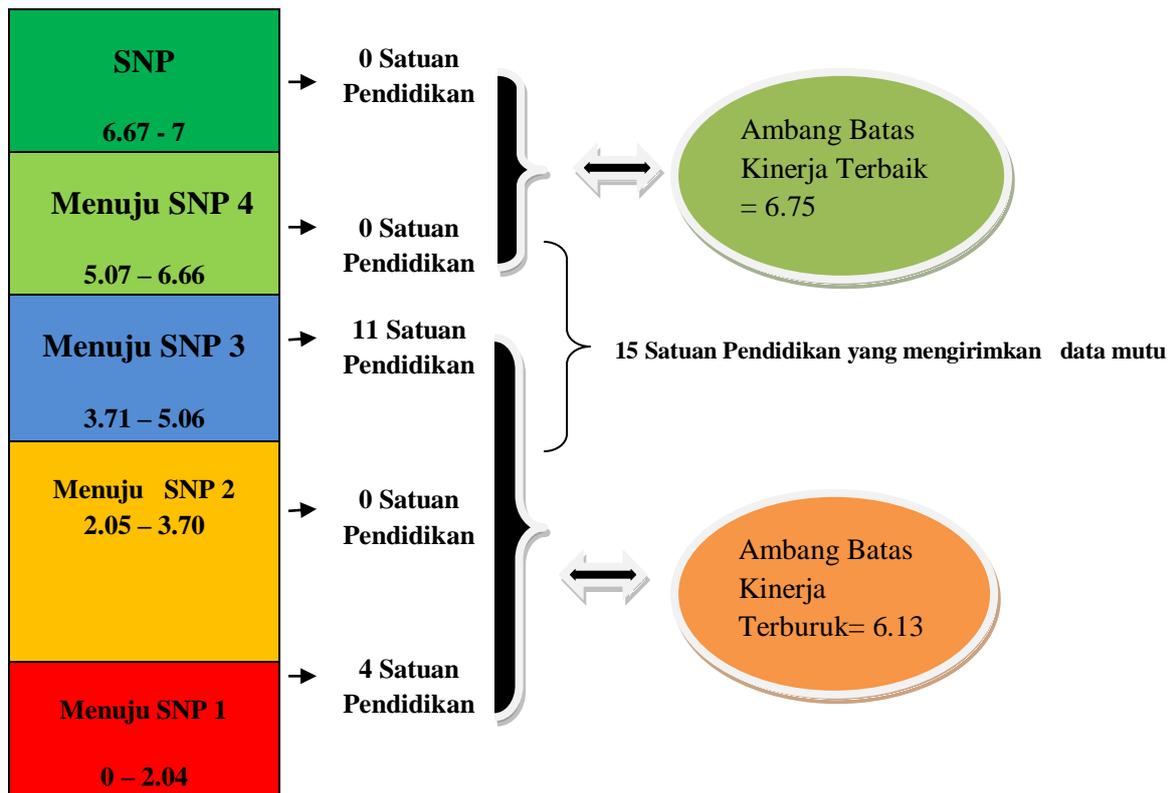


Capaian indikator 1.1 (Persentase Satuan pendidikan jenjang SMA yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75) berdasarkan tahun 2020 dan tahun 2021 serta perbandingannya dengan target akhir Renstra melalui tabel berikut ini:

Realisasi (%) 2020	Tahun 2021			Target Renstra 2021	Capaian Terhadap Renstra 2021
	Target PK (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
0 %	24.7 %	0 %	0 %	27.4 %	0 %

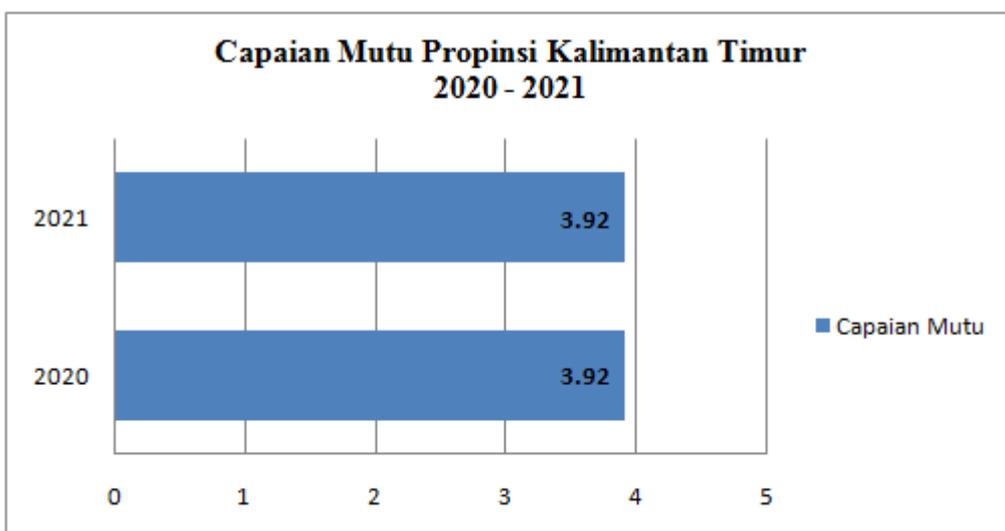
Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Persentase Satuan pendidikan jenjang SLB yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75, pada tahun 2020 terealisasi 0 % sedangkan pada tahun 2021 juga terealisasi 0 %. Realisasi pada tahun 2021 di bawah target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepala LPMP Kalimantan Timur 2021 dan juga berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam Renstra LPMP Kalimantan Timur tahun 2021 yakni 27.4 %. Hal ini disebabkan karena jenjang SLB merupakan program baru LPMP dan SLB belum pernah mendapat pendampingan tentang Penjaminan Mutu Pendidikan serta didalam aplikasi PMP jenjang SLB juga belum ada akses input data mutu sekolah.

**Rata – rata capaian SNP SLB 2021 (baseline data PMP 2020)**



Pada saat proses SPMI dilakukan dengan baik dan benar maka akan menunjukkan hasil yang konsisten.

Berikut grafik tren potret mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil capaian SNP 2020 dan 2021 untuk seluruh jenjang SLB yang diperoleh dari aplikasi PMP online sebagai berikut :



Grafik. Capaian Mutu SLB Propinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan rapot mutu sekolah yang terdapat dalam aplikasi PMP online dari tahun 2020–2021, capaian mutu SLB masih terealisasi 0 %. Hal ini disebabkan karena SLB pada tahun 2020 baru masuk ke dalam program LPMP dan SLB sebelumnya belum pernah masuk dalam daftar aplikasi PMP.

- Hambatan dan Kendala

- a. Pada tahun 2021 ini hambatan dan permasalahan yang ditemukan dalam realisasi output untuk mengukur indikator kinerja persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 adalah dengan adanya wabah pandemi yang bersifat global mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan baik dari segi anggaran maupun dari segi mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- b. Adanya reorganisasi Kemendikbud, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda dan semua dalam masa transisi baik dalam perubahan struktur organisasi, pergantian pejabat eselon, yang tentunya juga butuh waktu untuk membahas ulang renstra 2020 - 2024 dalam melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan organisasi Kemendikbud, serta kegiatan yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh pusat juga tertunda dan sangat mempengaruhi kegiatan lainnya.
- c. Hasil rapot mutu sekolah untuk tahun 2020, dan 2021 belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja sekolah secara optimal dan komprehensif serta belum adanya pengembangan sistem informasi yang terinterintegrasi dan dapat diakses secara akurat, terupdate dalam mengukur score card kinerja seluruh sekolah.
- d. Hasil SPMI sekolah baik tahun 2020 maupun tahun 2021 , belum juga dapat diakses datanya.

- Langkah Antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan di atas adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan dengan secara daring, dan melakukan revisi anggaran agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
- b. Berkoordinasi dengan pusat, mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara daring;
- c. Koordinasi dan menjalin hubungan komunikasi secara intens dengan pihak satgas pusat, agar aplikasi rapot mutu, dapat terintegrasi dengan AKM dan survey karakter, kompetensi kualifikasi guru dan dapat diakses untuk mengetahui capaian kinerja (score card) seluruh sekolah 2021
- d. Menggunakan data baseline dari nilai indeks mutu tahun 2020 ( capaian SNP tahun 2020).

## 5. Persentase Kesenjangan Hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.

Pada indikator kinerja persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada satuan pendidikan SD, sumber data yang diperoleh adalah berdasarkan laporan hasil pelaksanaan assessment kompetensi minimal dan laporan hasil survey karakter yang dilaksanakan oleh Ditjen PAUD, DIKDAS dan DIKMEN serta Balitbang. Assesmen Kompetensi Minimal adalah jenis assessment yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi dan sains. Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah. Target pelaksanaan AKM dan survey karakter adalah seluruh satuan pendidikan di semua jenjang. Adapun metode perhitungan sebagai berikut :

---

### Metode Perhitungan:

---

$$\% = (\sum \text{jumlah siswa yang mencapai nilai minimum AKM Literasi}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$$

---

### Metode Perhitungan:

---

$$\% = (\sum \text{jumlah siswa yg mencapai nilai minimum AKM Numerasi}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$$

---

### Metode Perhitungan:

---

$$\% = (\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum survey karakter}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti survey karakter}) \times 100\%$$

---

**Metode Perhitungan:**

---

$$\% = \frac{(\sum \text{jumlah siswa yg mencapai nilai minimum AKM} + \sum \text{jumlah siswa yg mencapai nilai minimum survey karakter})}{(\sum \text{siswa yang mengikuti survey AKM} + \sum \text{siswa yang mengikuti survey karakter})} \times 100\%$$

Berdasarkan data hasil assessment tahun 2021 yang diperoleh dari pusat assessment nasional ini untuk masing – masing bidang yang diujikan tingkat kemampuan siswa ini dibagi atas 3 kelompok yakni untuk kelompok literasi dikelompokkan menjadi literasi dasar di bawah kompetensi minimum, literasi cakup mencapai kompetensi minimum dan literasi mahir di atas kompetensi minimum sedangkan untuk kelompok numerasi dikelompokkan kedalam 4 bagian yakni numerasi yang perlu intervensi khusus jauh dibawah kompetensi minimum, numerasi dasar di bawah kompetensi minimum dan numerasi cakup mencapai kompetensi minimum serta numerasi mahir di atas kompetensi minimum, sedangkan untuk bidang survey karakter tingkat di kelompokkan juga menjadi 4 kelompok yakni belum terinternalisasi, perlu dikembangkan, berkembang dan membudaya. Berdasarkan data hasil assessment nasional tahun 2021 setelah dilakukan pengolahan data dan dihitung berdasarkan rumus diatas maka diperoleh persentase rata – rata untuk bidang literasi di propinsi Kalimantan Timur sebesar 0.24 %, sedangkan untuk bidang numerasi di peroleh 3,61 % dan untuk bidang survey karakter diperoleh sebesar 0.34 %. Nilai persentase rata – rata kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk di propinsi Kalimantan Timur diperoleh hasil 1,40 %. Adapun tabel hasil ketercapaian dari target sebagai berikut:

Realisasi (%) 2020	Tahun 2021			Target Renstra 2021	Capaian Terhadap Renstra 2021
	Target PK (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
0 %	5 %	100 %	1,40 %	5 %	172 %

Berdasarkan hasil hitungan perbandingan target dan realisasi dari tabel di atas diperoleh persentase capaian kesenjangan sebesar 1,40%, hasil ini berada dibawah dari target 5% hal ini menunjukkan hasil yang baik karena semakin kecil nilai kesenjangan maka semakin baik berarti terdapat 98.6 % tidak ada kesenjangan. Jika dihitung ketercapaian realisasi terhadap target yang ada, capaian telah melebihi target yang berarti dengan progress 100% kelebihanannya dapat dihitung dengan mengambil selisih target dengan realisasi sebesar 3.6 %.

Jika hasil dari selisih ini dibandingkan dengan target maka diperoleh persentase sebesar 72 %. Sehingga total realisasi menjadi 172 % atau 72 % melebihi target.



Gambar : Pengukuran AKM tingkat SD



Gambar : Pengukuran AKM tingkat SMP

- Hambatan dan Kendala
  - a. Pada tahun 2021 ini hambatan dan permasalahan yang ditemukan dalam realisasi output untuk mengukur indikator kinerja persentase kesenjangan AKM dan survei karakter antara sekolah yang berkinerja terbaik dan berkinerja terburuk pada satuan pendidikan adalah hasil AKM dan survei karakter belum dapat diakses datanya secara akurat melalui sebuah aplikasi online sehingga dalam menjawab indikator kinerja ini harus menunggu data dari pusat assessment Nasional, dimana pelaksanaan assessment ini baru juga dimulai pada bulan September – Oktober 2021.
  - b. Adanya wabah pandemi yang bersifat global mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan baik dari segi anggaran maupun dari segi mekanisme pelaksanaan kegiatan.
  - c. Adanya reorganisasi Kemendikbud, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda dan semua dalam masa transisi baik dalam perubahan struktur organisasi, pergantian pejabat eselon, yang tentunya juga butuh waktu untuk membahas ulang renstra 2020 - 2024 dalam melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan organisasi Kemendikbud, serta kegiatan yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh pusat juga tertunda dan sangat mempengaruhi kegiatan lainnya.

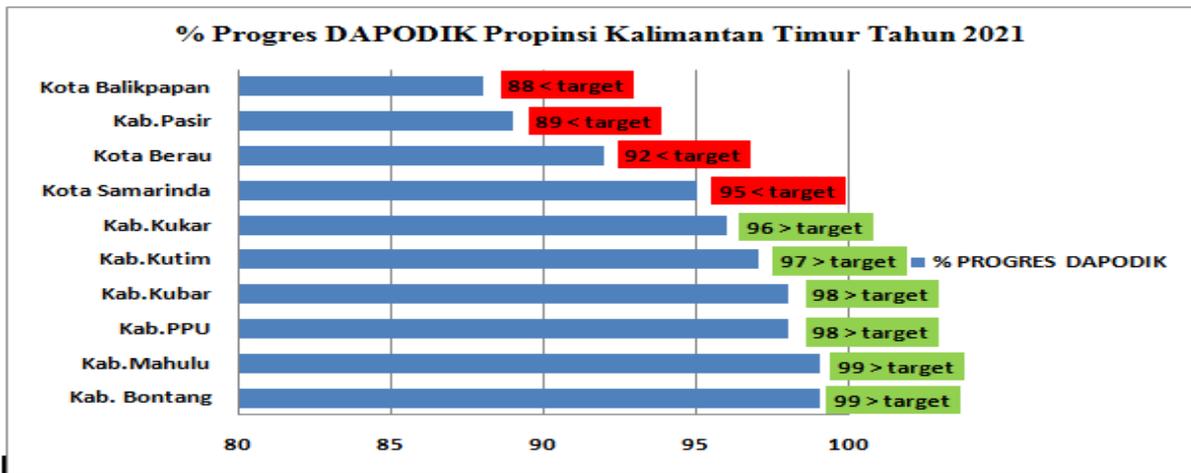
- Langkah Antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan di atas adalah:

- a. Koordinasi dengan pusat mengenai data hasil AKM dan survei karakter sehingga data ini dapat diperoleh secara nasional.
- b. Melaksanakan kegiatan dengan secara daring, dan melakukan revisi anggaran agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
- c. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara daring secara internal maupun eksternal dengan pusat;

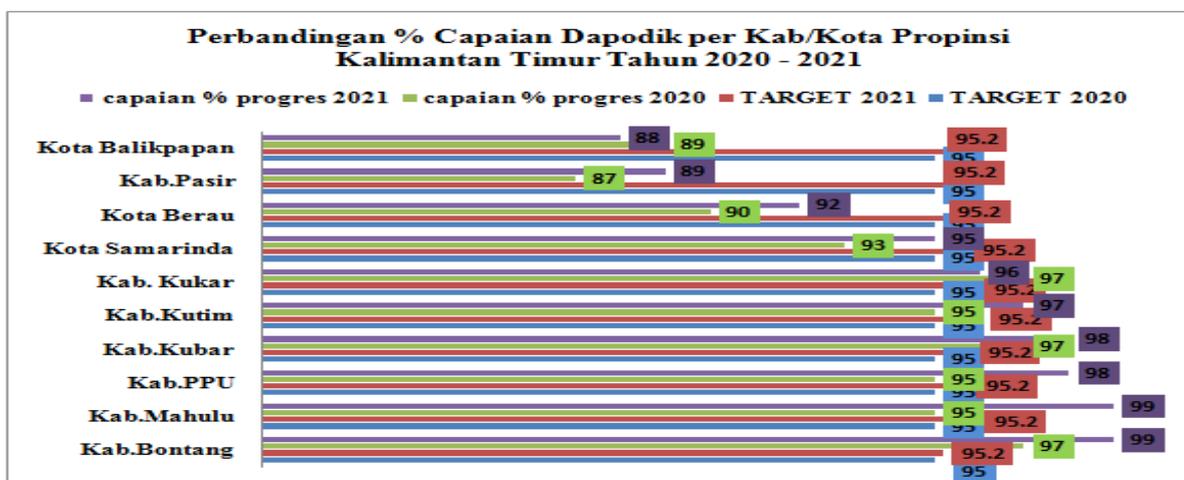
#### **6. Persentase Kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan**

Untuk menjawab indikator kinerja persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan sumber datanya mengarah pada aplikasi online data pokok pendidikan (Dapodik) yang dikembangkan oleh Kemdikbud. Data pokok pendidikan (dapodik) adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Karena tanpa perencanaan pendidikan yang matang maka seluruh program yang terbentuk dan perencanaan tersebut akan jauh dari tujuan yang diharapkan. Untuk melaksanakan perencanaan pendidikan maupun untuk melaksanakan program-program pendidikan secara tepat sasaran dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan terus up to date. Dengan ketersediaan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan terus up to date tersebut maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan. Adapun persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan yang diperoleh aplikasi online Dapodik 2021 sebagai berikut :



Sumber : Aplikasi DAPODIK 2020 per tanggal 6 Desember 2021

Data perbandingan tahun sebelumnya mengenai data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan dari 10 kab/kota di Propinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan diperoleh rata – rata persentase sebagai berikut :

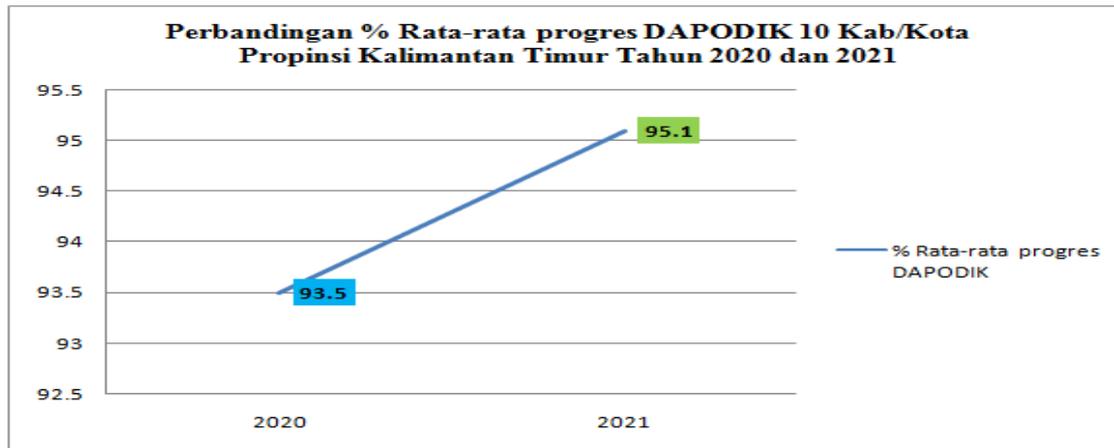


Sumber : Aplikasi DAPODIK 2020 dan 2021 per tanggal 15 Desember 2020 dan 6 Desember 2021

Berdasarkan data persentase progress DAPODIK propinsi Kalimantan Timur tahun 2021, kab/kota yang memiliki persentase data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan yang berada di atas target 95,2 % dari perjanjian kinerja tahun 2021 adalah Kota Bontang, dan Kab. Mahulu 99 %. Kab. PPU dan Kab. Kubar 98 %. Kab/kota yang mencapai 97 % progress dapodiknya adalah Kab. Kutim dan Kab. Kukar 96 %. Sedangkan Kab/kota yang berada dibawah target adalah Kota Samarinda dengan progress dapodik 95%, kota Berau 92% dan kab. Pasir 89% serta Kota Balikpapan 88 %.

Sedangkan persentase rata-rata Persentase data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan pada tahun 2020 di propinsi Kalimantan Timur ini diperoleh persentase rata – rata 93,5 % per tanggal 15 Desember 2020 dari 10 kab/kota. Tahun 2021 diperoleh rata – rata 95.1 % per tanggal 6 Desember 2021. Persentase pada

tahun ini mengalami kenaikan.dari tahun sebelumnya namun rata rata capaian masih dibawah dari target, karena hasilnya masih belum finish di pengujung tahun 2021. Berikut grafik perbandingan capaian persentase rata – rata progres DAPODIK dari 10 kab/kota tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut :



Adapun hambatan dan kendala serta langkah antisipasi yang dilakukan dalam melaksanakan indikator kinerja persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan pada tahun 2021 sebagai berikut :

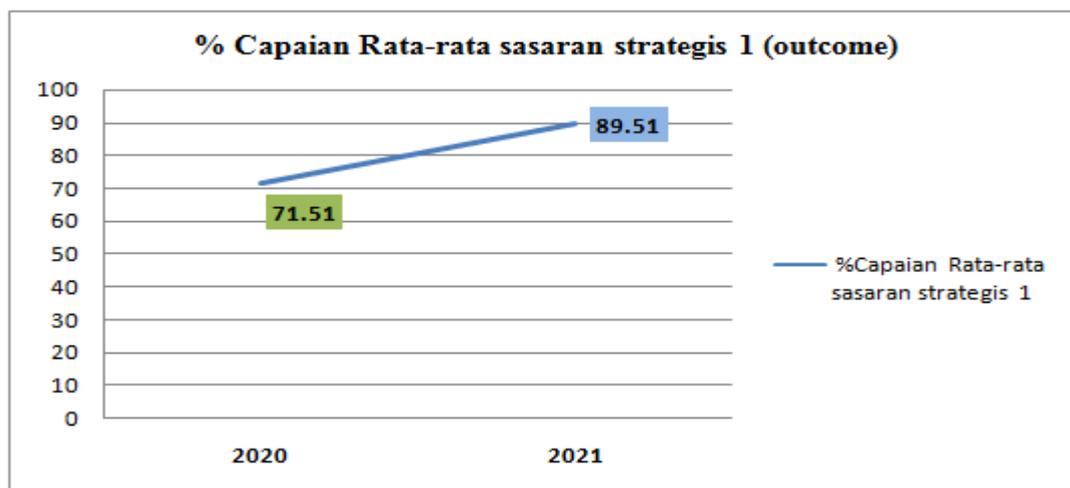
- Hambatan dan Kendala
  - a. Pada tahun 2021 ini hambatan dan permasalahan yang ditemukan dalam realisasi output untuk mengukur indikator kinerja persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan adalah masih ada kabupaten/kota yang progres DAPODIK nya masih di bawah target, hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemi yang bersifat global mengakibatkan para pengawas di kab/kota tersebut kurang melakukan kunjungan ke sekolah dalam mendorong sekolah untuk mengupdate data terbaru dalam aplikasi.
  - b. Adanya reorganisasi Kemendikbud, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda dan semua dalam masa transisi baik dalam perubahan struktur organisasi, pergantian pejabat eselon, yang tentunya juga butuh waktu untuk membahas ulang renstra 2020 - 2024 dalam melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan organisasi Kemendikbud, serta kegiatan yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh pusat juga tertunda dan sangat mempengaruhi kegiatan lainnya.
- Langkah Antisipasi
 

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan di atas adalah:

  - a. Mendorong pengawas sekolah dan para stakeholder pendidikan yang ada di Kab/kota untuk memotivasi dan mengajak satuan pendidikan untuk menginput data sekolah kedalam aplikasi DAPODIK, dimana data tersebut digunakan sebagai acuan dalam rangka pemberian dana BOS dari pusat;

- b. Berkoordinasi dengan PUSAT, mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara daring.

Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata pencapaian sasaran (outcome) ke -1 pada sasaran strategis Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja LPMP Kalimantan Timur 2021 adalah 89.51 % kategori sangat baik hal ini menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan proses penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan maka akan meningkat pula kinerja satuan pendidikan dan mutu pendidikan di propinsi Kalimantan Timur. Adapun grafik perbandingan capaian sasaran (outcome) ke-1 pada sasaran strategis Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan sebagai:



### Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang Baik

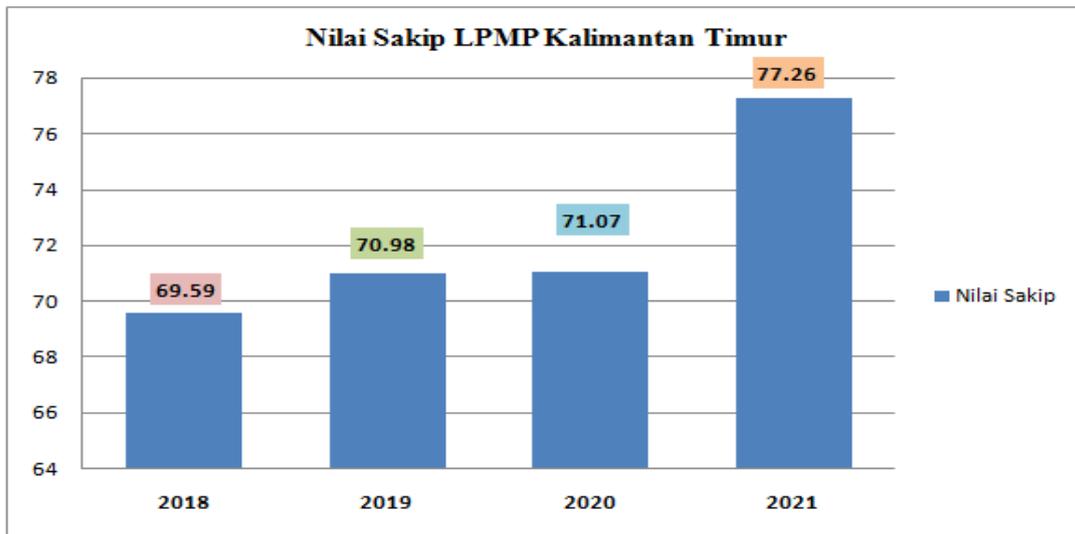
Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “*Terwujudnya Tata Kelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang Baik*”, didalam prosesnya juga tidak terlepas dari 8 indikator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Dimana terdapat 6 indikator kinerja pada sasaran strategis “*Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan*” dan 2 indikator kinerja pada sasaran strategis “*terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur*”. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan dan mendukung ketercapaian visi dan misi Kemendikbud Riset dan Teknologi pada umumnya dan LPMP Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tentunya diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni: pemerintahan yang efektif, efisien,transparansi, akuntabel, serta adanya peningkatan layanan publik. Pada sasaran strategis “*Meningkatnya tatakelola LPMP* ” indikator yang diukur adalah:

### 7. Nilai SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Pengukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dari nilai SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur. SAKIP ini diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran yang

berorientasi pada hasil. Oleh karena itu SAKIP ini perlu dievaluasi setiap tahun atas pelaksanaan program untuk meningkatkan efektifitas pembangunan. Adapun nilai SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur 2018,2019 dan 2020 dan 2021 sebagai berikut :

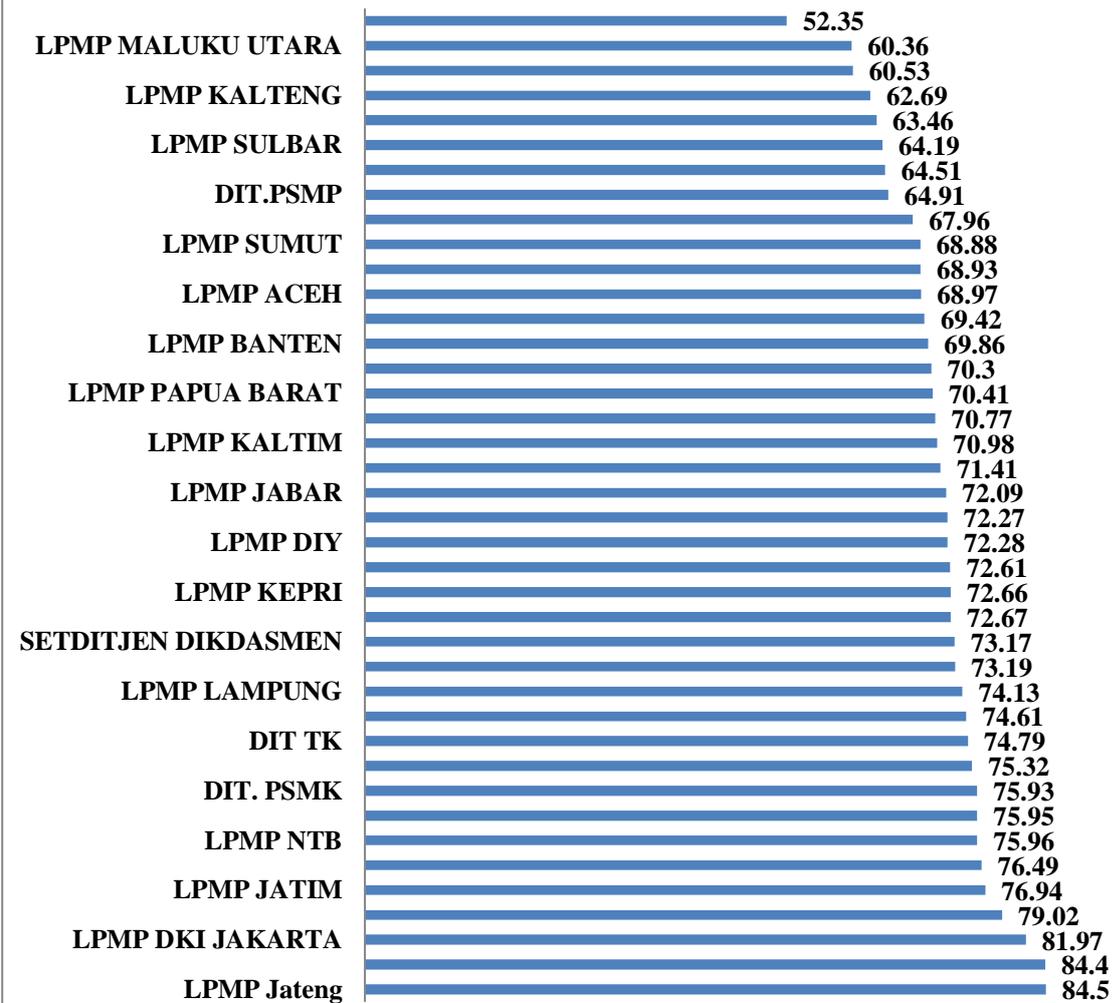
**Tabel 3.36. Indikator Kinerja predikat SAKIP**



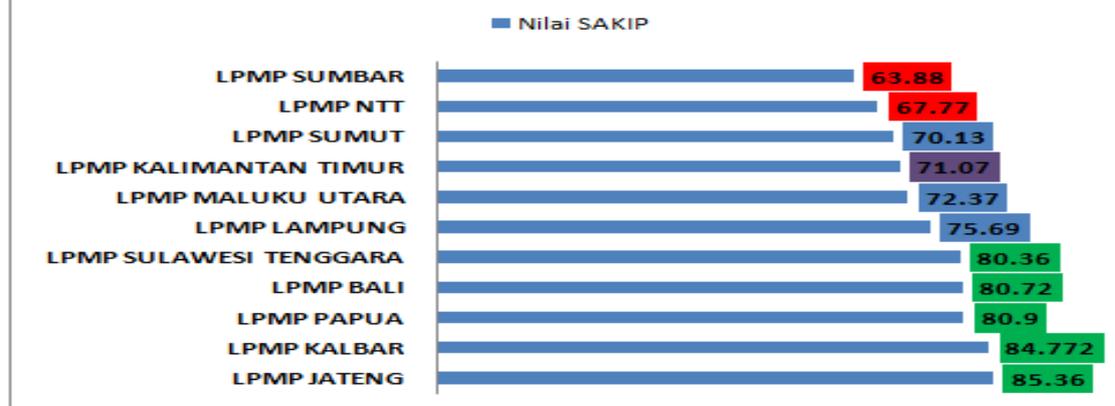
Nilai SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 – 2021 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun meski belum terealisasi sesuai dengan target yang ada pada perjanjian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa LPMP Provinsi Kalimantan Timur sudah meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran yang borientasi hasil.

Berikut ini disajikan perbandingan capaian nilai SAKIP LPMP di seluruh propinsi dari tahun 2019 dan tahun 2020 :

**Grafik Nilai SAKIP 2019**  
**Satker/UPT Ling.Ditjen Dikdasmen**



**NILAI SAKIP LPMP TAHUN 2020**



Untuk mencapai nilai minimal SAKIP sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja 2021 LPMP Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu melaksanakan proses penjaminan mutu internal di lingkungan LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Yang di

dalamnya mencakup proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan peningkatan kinerja lembaga.

## 8. Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL

Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Sedangkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi perencanaan, efektifitas pelaksanaan, efisiensi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Tabel. Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL tahun 2019, 2020 dan 2021

Tahun	Target Nilai Kinerja	Nilai EKA	Nilai IKPA	Total Nilai Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5	6
2019	80		98.5	99.44	Sangat Baik
2020	97	98.46	96.71	97.76	Sangat Baik
2021	97	84.72	99.2	90.51	Sangat Baik

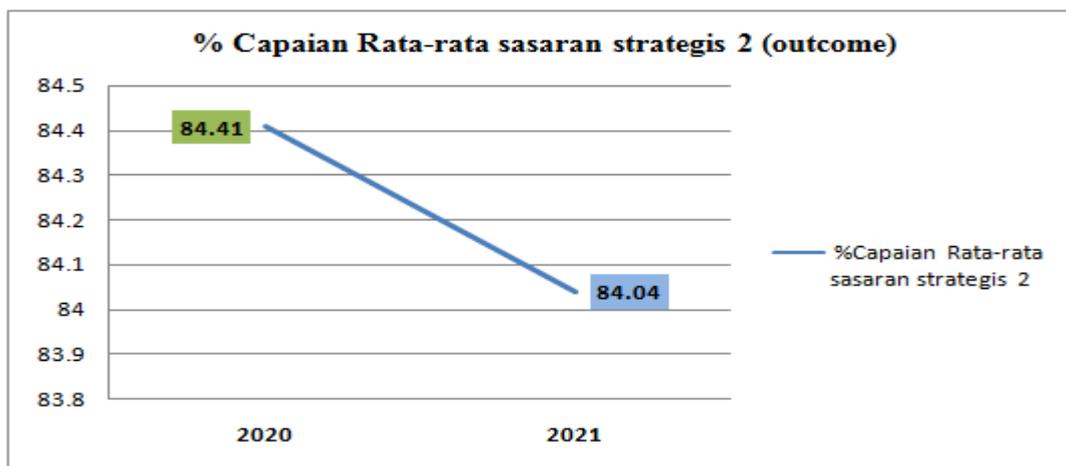
Sumber: Aplikasi Spasikita(simproka) per tanggal 10 Januari 2022

Dalam melaksanakan program tahunan LPMP Provinsi Kalimantan Timur, maka dalam proses pelaksanaannya perlu juga dievaluasi baik mengenai IKPA (Kinerja proses anggaran) dan EKA (Evaluasi kinerja akhir yang berorientasi hasil). Pada tahun 2021 nilai EKA LPMP Kalimantan Timur mengalami penurunan karena pada output fasilitasi dan pembinaan lembaga yang terdapat pada RKAKL, melebihi dari jumlah sekolah yang sebenarnya di provinsi Kalimantan Timur sementara jumlah seluruh sekolah tidak mencapai angka tersebut. SMK adalah jenjang pendidikan yang telah mengalami restrukturisasi sekarang tidak berada dibawah naungan Ditjen PAUD Dikdasmen melainkan dibawah naungan Ditjen Advokasi. Hal ini tentunya mempengaruhi nilai EKA dan efisiensi anggaran mengakibatkan total nilai kinerja anggaran LPMP Kalimantan Timur juga menurun dari tahun sebelumnya menjadi 90.51 meski demikian nilai kinerja anggaran LPMP Kalimantan Timur masih dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2019, dan tahun 2020 LPMP Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 2019 baik dalam kinerja proses (IKPA) dan kinerja akhir (EKA). Adapun jenis penghargaan yang telah diraih dalam hal pelaksanaan kinerja anggaran sebagai berikut:



LPMP Provinsi Kalimantan Timur, akan senantiasa berusaha untuk menjalankan setiap program sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam reformasi birokrasi, yakni reformasi yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), anggaran berbasis kinerja, organisasi (Kelembagaan) berbasis kinerja, dan sistem sumber daya aparatur yang berorientasi pada kinerja sebagai prioritas utama.

Adapun grafik perbandingan capaian sasaran (outcome) ke-2 pada sasaran strategis Meningkatkan tatakelola LPMP sebagai berikut:



Ketercapaian ke-5 indikator kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur 2021 dikarenakan adanya dukungan oleh beberapa program/kegiatan yang telah dipetakan sesuai dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator kinerja **Persentase Satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75**, didukung oleh output dan kegiatan sebagai berikut :
  - 6397.QDB.750; Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya
  - a. Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu;
  - b. Analisis Data Mutu;

- c. Penusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu;
  - d. Deseminasi Hasil Pemetaan Mutu;
  - e. Koordinasi Vaksinasi Covid-19 Bagi PTK dengan Dinas Kabupaten/kota;
  - f. Sosialisasi program sekolah penggerak tahap 2;
  - g. Forum pemangku kepentingan daerah (PSP);
  - h. Koordinasi seleksi program sekolah penggerak (PSP) Tahap 2;
  - i. Sosialisasi program guru penggerak bagi kepala sekolah;
  - j. Coaching clinic program sekolah penggerak tahap 1 dan 2;
  - k. Koordinasi program PMP;
  - l. Bimtek penguatan kapasitas tim Siyandu respek;
  - m. Analisis supervisi mutu pendidikan;
  - n. Supervisi program sekolah penggerak
2. Indikator kinerja **Persentase kesenjangan AKM dan survei karakter antara sekolah yang berkinerja terbaik dan berkinerja terburuk** didukung oleh output dan kegiatan sebagai berikut;

6397.QDB.750; Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya

- a. Koordinasi PTM dan PJJ dengan dinas Kab.Mahulu;
- b. Analisis ANBK;
- c. Koordinasi Kesiapan data TIK dengan Dinas Kab/kota;
- d. Rapat koordinasi kunjungan kerja menteri terkait PTM dan vaksin covid 19 bagi PTK di Kalimantan Timur;
- e. Koordinasi vaksinasi covid 19 bagi PTK dengan dinas kab/kota;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB 2021 ;
- g. Analisis hasil monev tatap muka pembelajaran;
- h. Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi berdasarkan SNP (ANBK);
- i. Monitoring pelaksanaan PTM pada satuan pendidikan;
- j. Workshop mitigasi sekolah darurat;

Dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja pada tahun 2021 LPMP Kalimantan Timur mulai melaksanakan kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Forum ini dilaksanakan untuk merefleksikan capaian sekolah penggerak, merencanakan komitmen peningkatan kualitas pendidikan, serta meeperkuat sinergitas antara semua stakeholder yang ada di daerah.



Gambar : Forum Pemangku Kepentingan Daerah di SDN No.10 Babulu Penajam Pasir Utara

2. Indikator kinerja **Persentase Kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan Dasar dan Menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan** didukung oleh output dan kegiatan sebagai berikut :

6397.QDB.750; Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya

- a. Bimtek verifikasi data mutu pendidikan;
- b. Pelaksanaan Pengumpulan Data Mutu Pendidikan.

4. Indikator kinerja **Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur** didukung oleh output dan kegiatan sebagai berikut :

2005. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

2005.EAC. Layanan Umum

2005.EAC.970. Dukungan Manajemen Satker;

1. Rintisan Non gelar
2. Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan fungsional di lingkungan PAUD, DIKDAS, dan DIKMEN;
3. Diseminasi Kepegawaian;
4. Penilaian DUPAK;
5. Sosialisasi Profesional Guru;
6. Penusunan Laporan Keuangan;
7. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan;
8. Penyusunan Manajemen Resiko LPMP Kaltim 2021;
9. Pencegahan covid19 di lingkungan internal LPMP Kaltim;
10. Deseminasi Arsiparis dan Persuratan;
11. Penerbitan Jurnal Pendidikan;
12. Perencanaan program dan Anggaran;
13. Penyusunan LAKIP;

14. Penyusunan Program Kerja;
15. Unit layanan Terpadu Keliling;
16. Penyusunan SOP Permohonan informasi public dan PPID tahun 2021;
17. Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan pelayanan public di LPMP Kaltim;
18. Capaciti Building PMP;
19. Uji public POS LPMP Penunjang pelayanan PMP Kaltim;
20. Pelaksanaan kemitraan dan implementasi program kerjasama.

5. Indikator kinerja **Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL**, didukung oleh output dan kegiatan sebagai berikut :

2005.EAA. Layanan Perkantoran

2005.EAA.001. Gaji dan Tunjangan

1. Pembayaran gaji dan tunjangan

2005.EAA.002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002.A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran ;

002.B. Langgan Daya dan Jasa;

002.D. Penggantian Barang Inventaris;

002.E. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Perkantoran;

2005.EAD. Layanan Sarana Internal

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan revisi terakhir Pagu Anggaran LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebesar Rp23.701.145.000,- (Dua Puluh Tiga milyar Tujuh Ratus Satu juta Seratus Empat Puluh Lima ribu rupiah). Pagu awal anggaran pada saat perjanjian kinerja adalah Rp26.637.586.000 ( Dua Puluh Enam milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ). Pagu anggaran ini mengalami revisi (terjadi pemotongan anggaran) sebesar Rp2.936.441.000,- (Dua milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) oleh pusat karena adanya masalah pandemi covid 19. Dari total pagu revisi terakhir yang dikelola, terdiri atas 2 kegiatan yakni: *kegiatan prioritas* dan *kegiatan penunjang*. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis 1 yakni *meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan*. Sedangkan kegiatan penunjang adalah kegiatan yang merupakan layanan dukungan manajemen dan kegiatan rutinitas perkantoran yang menunjang pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatkan tata kelola LPMP.

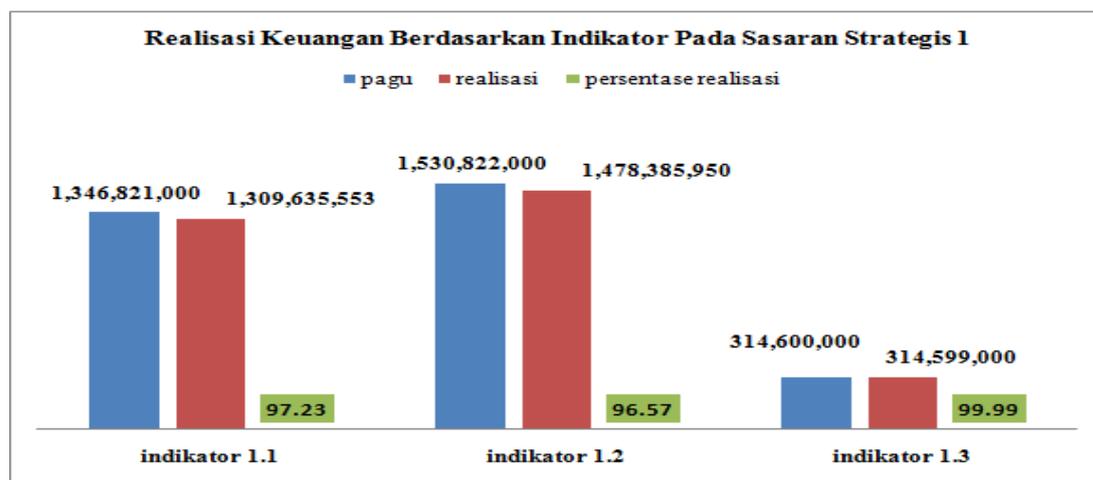
Pagu anggaran yang diperjanjikan digunakan untuk membiayai pencapaian dua sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran strategis *meningkatkan penjaminan mutu di seluruh jenjang pendidikan* didukung oleh 3 indikator kinerja, sedangkan sasaran strategis 2 Meningkatkan tata kelola LPMP didukung oleh 2 indikator kinerja.

Pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.701.145.000,- dan teralisasi sebesar Rp23.579.888.717,- dengan persentase capaian sebesar 99.49% dari total pagu untuk *output* prioritas.

Ketercapaian anggaran tersebut di atas didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja, yang terdiri atas 2 *output* yaitu:

1. *Output* Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, terdiri atas 3 indikator kinerja (persentase satuan pendidikan jenjang SD,SMP, SMA dan SLB yang memiliki kinerja sekolah minimal 75, persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat,terbarukan dan berkelanjutan), pada tahun 2021, terealisasi sebesar Rp3.450.400.303,- dengan persentase capaian sebesar 96.95% dari jumlah pagu Rp3.558.869.000

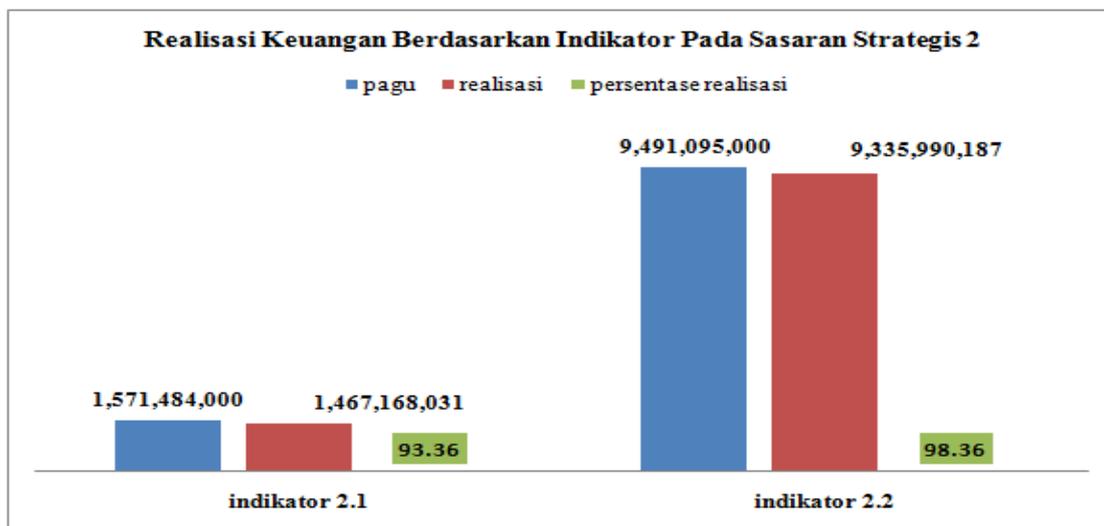
Adapun grafik realisasi keuangan terkait pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan sebagai berikut :



2. Sedangkan sasaran strategis Meningkatnya tatakelola LPMP, didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu:Indikator Kinerja Nilai minimal SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL.

*Output* ini didukung oleh indikator kinerja kegiatan yaitu *Output* layanan perkantoran, dan layanan umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.968.896.000,- yang terealisasi sebesar Rp19.656.109.214,-atau 98.43%.

Adapun grafik realisasi keuangan terkait pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan dan Meningkatnya tata kelola LPMP sebagai berikut :



## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### 1. Efisiensi SDM

Pelaksanaan realisasi kegiatan melibatkan pegawai ASN LPMP Provinsi Kalimantan Timur dimana pelaksanaan kegiatan pada umumnya melalui sistem daring yakni zoom meeting.

### 2. Efisiensi Anggaran

LPMP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 berhasil melakukan penghematan anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran. Dana tersebut berasal dari efisiensi belanja barang, yang meliputi perjalanan dinas dan paket *meeting*, honorarium, belanja bahan, belanja operasional, dan non operasional lainnya.

Perhitungan nilai efisiensi RO satuan kerja menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:

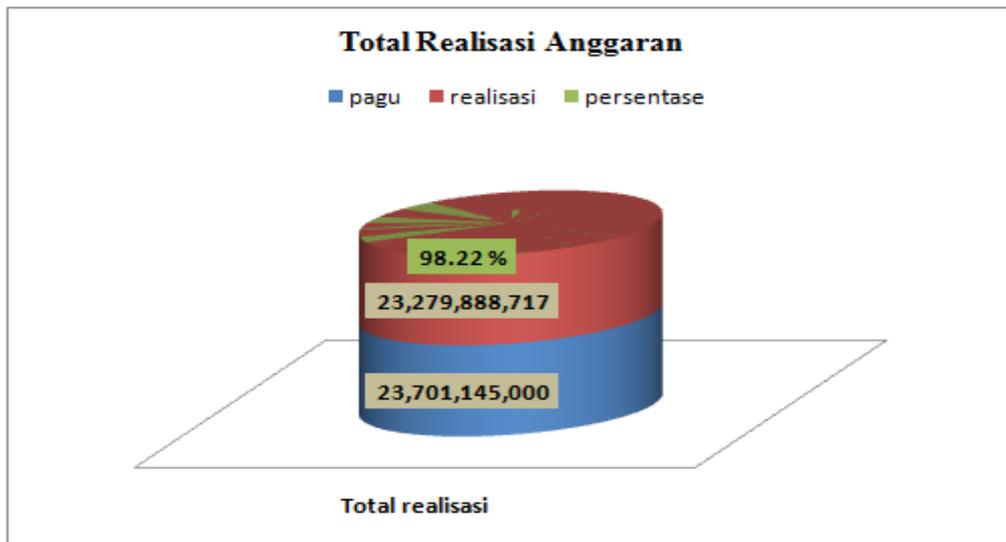
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

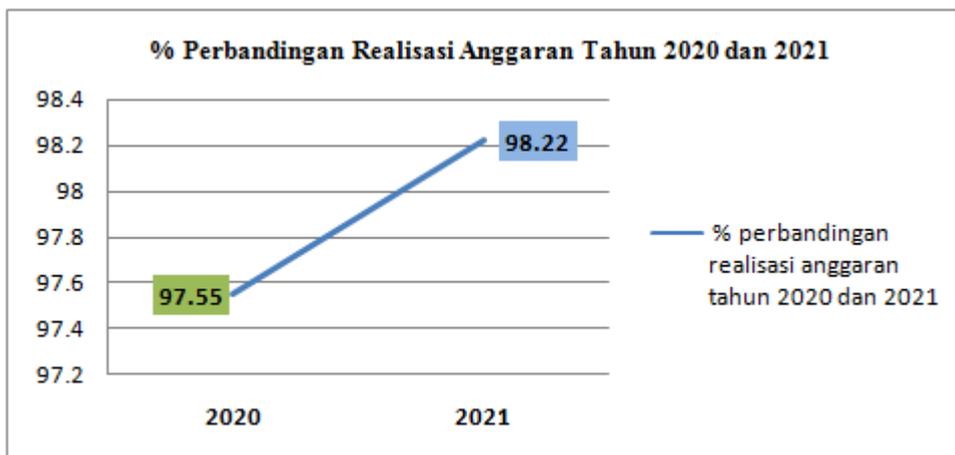
Sumber : Permenkeu RI No.249/PMK.02/2011

Nilai efisiensi anggaran LPMP Kalimantan Timur yang diperoleh dari aplikasi simproka pertanggal 28 desember 2021 sebesar 1.79. Berdasarkan hasil dan rumus tersebut maka diperoleh hasil perhitungan nilai efisiensi RO sebesar 54.47%, hal ini menunjukkan bahwa LPMP Kalimantan Timur tahun 2021 berhasil melakukan penghematan anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran.

**Grafik 3.48 Realisasi Anggaran 2021**



Grafik persentase perbandingan realisasi anggaran LPMP Kalimantan Timur tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:



Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Proses Pelaksanaan Anggaran LPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berdasarkan aplikasi online SIMPROKA tahun 2021 adalah 90.83 atau termasuk kategori Sangat Baik. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 ini LPMP Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi yang berkinerja baik untuk seluruh kategori dalam hal penyelenggaraan kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2019 dan 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata pencapaian sasaran (outcome) ke -2 pada sasaran strategis Meningkatnya tata kelola LPMP yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja LPMP Kalimantan Timur 2021 adalah 84.04 % kategori sangat baik hal ini menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan proses penjaminan mutu internal LPMP Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil maka akan meningkat pula capaian kinerja LPMP Kalimantan Timur, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya nilai SAKIP LPMP Kalimantan Timur dari tahun ke tahun. Adapun grafik

perbandingan capaian sasaran (outcome) ke-2 pada sasaran strategis Meningkatnya tata kelola LPMP sebagai berikut:

Hambatan dalam capaian kinerja *input*/penyerapan anggaran disebabkan karena terbatasnya SDM LPMP Provinsi Kalimantan Timur dan adanya wabah pandemi covid 19 serta adanya reorganisasi kemendikbud mengakibatkan pagu anggaran juga berubah ubah. Langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang terjadi adalah dengan mengubah bentuk pola kegiatan, yang awalnya memerlukan SDM yang banyak menjadi kegiatan yang memerlukan SDM yang kecil dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di LPMP Provinsi Kalimantan Timur dan mengubah metode pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi sistem daring serta koordinasi dengan pusat mengenai evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Meskipun demikian, pencapaian kinerja keluaran sampai pada akhir bulan Desember ini terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan dan yang terdapat dalam perjanjian kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur 2021.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga. Hal ini dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis LPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020–2024, yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program, dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh LPMP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021.

Pengukuran Rata-rata Capaian Kinerja Keluaran (Capaian *Output*) sampai pada akhir Bulan Desember 2021 menunjukkan pencapaian sebesar 100 % termasuk kategori *sangat baik*. Sedangkan rata-rata persentase pencapaian pengukuran indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis LPMP Provinsi Kalimantan Timur “*Meningkatnya Penjaminan Mutu di Seluruh Jenjang Pendidikan*” adalah ekuivalen dengan terjadinya peningkatan rata-rata capaian SNP diseluruh jenjang pendidikan, dimana capaian SPMI, dan capaian AKM (assesmen kompetensi minimal) serta capaian kinerja sekolah menunjukkan hasil yang baik pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semua sistem terlaksana dengan baik maka akan menghasilkan hasil yang konsisten.

Realisasi penyerapan anggaran meskipun kegiatannya menumpuk pelaksanaannya di akhir tahun, disebabkan adanya wabah pandemi covid 19 tidak mempengaruhi daya serap anggaran di tahun 2021 ini. Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2020 dimana LPMP Provinsi Kalimantan Timur hanya dapat merealisasikan anggaran sebesar 97.55%, sedangkan di tahun 2021 daya serap anggaran sebesar 98.22%, daya serap anggaran ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. LPMP Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun target penyerapan anggaran sampai akhir Desember 2021, namun tidak sesuai dengan target rencana realisasi. Hal ini disebabkan terbatasnya SDM LPMP Provinsi Kalimantan Timur dan adanya wabah pandemi covid 19 yang dapat merubah sistem pelaksanaan kegiatan yang awalnya direncanakan dengan secara luring berubah menjadi daring.

#### B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan perjanjian kinerja dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan penyusunan indikator kinerja individu masing – masing pegawai.
2. Pemanfaatan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

3. Peningkatan sistem informasi kinerja satuan pendidikan berupa capaian akreditasi sekolah, capaian SPMI, Assesment Kompetensi Minimal (AKM) dan capaian SNP yang dapat terintegrasi dengan aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan sehingga pemangku kepentingan dapat lebih mudah mengakses data yang akurat dan yang terbaru dan dapat diperoleh profil mutu pendidikan di Propinsi Kalimantan Timur.
4. Evaluasi terhadap program, agar program dan kegiatan tepat sasaran dalam mengukur keberhasilan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja LPMP.
5. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
6. Menjalin komunikasi intens dengan para *stakeholder* di seluruh kab/kota yang ada di propinsi Kalimantan Timur dan pusat dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan. Hal ini agar permasalahan yang terkait dengan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan dan peningkatan kinerja satuan pendidikan mendapatkan solusi yang baik ditahun berikutnya.

# LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2021**

Uraian Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	2021			Target renstra 2021	% Capaian terhadap renstra 2021
				Target	Realisasi	% Pencapaian		
1. Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan	1.1	Persentase satuan Pendidikan (jenjang SD,SMP,SMA , dan SLB ) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	37.15 %	24.7 %	62.94 %	62.94 %	27.4 %	35.54 %
	1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	0 %	5 %	100 %	1.40 %	5 %	172 %
	1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akura,terbarukan dan berkelanjutan	93.5 %	95.2 %	95.1 %	95.2%	95%	0.1%
Meningkatnya tata kelola LPMP	2.1	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur	71.07 (BB)	A	77.26 (BB)	77.26	A	(BB) 77.26
	2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL	97,76	97	90.51	93.30 %	97.5	92.83 %

**Capaian Kinerja Sasaran (Output) LPMP Provinsi Kalimantan Timur 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Kinerja 2021	Anggaran	Realisasi 2021	REALISASI 2021				Target Rens tra 2021
						KINE RJA OUT PUT	%	Anggaran	%	
1. Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Jenjang Pendidikan	1.1	<b>Persentase satuan pend.(jenjang SD,SMP,SMA dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah ( indeks mutu ) minimal 75</b>	<b>24.7 %</b>	1.346.821.000	1063 sekolah	37.36 %	62.94%	1.309.635.553 (SD,SMP,SMA, SLB)	97.23 %	27.4 %
	1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	.5%	1.530.822.000	1.063 sekolah	37.36 %	0 %	1.478.385.950	96.57 %	5%
	1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akura,ter	95.2 %	314.600.000	2.834 sekolah	99.6 1%	95 %	314.599.000	99 %	95.2 %

		barukan dan berkelanjutan								
2. Terwujudnya Tatakelola LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang baik	2.1	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kalimantan Timur	A	1.571.484.000	1 Layanan	100 %	BB	1.467.168.031	93.36 %	A
	2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL	90	9.491.095.000	2 layanan	100 %			98.36 %	92.83 %
							93.30	9.335.990.187		

### Perjanjian Kinerja Awal (1)



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur  
Dengan  
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.**

**Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Jumeri, S.TP., M.Si.**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Januari 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah**

**Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**



**Jumeri, S.TP., M.Si.**



**Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.**



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

### Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	24.7
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
		[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95.2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 20.585.507.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 6.052.079.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 26.637.586.000</b>

Jakarta, 29 Januari 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

**Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**



**Jumeri, S.TP., M.Si.**



**Mohamad Hartono, S.H., M.Ed.**

## Perjanjian Kinerja Revisi (1)



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur  
Dengan  
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd**

**Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Jumeri, S.TP., M.Si.**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda, 29 November 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah**

**Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**

**Jumeri, S.TP., M.Si.**

**Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd**

### Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	24.7
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
		[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95.2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 19.968.896.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 3.732.249.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 23.701.145.000</b>

Samarinda, 29 November 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah**

**Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**



**Jumeri, S.TP., M.Si.**



**Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu laporan kinerja LPMP Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen LPMP Provinsi Kalimantan Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi iatau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Samarinda, 24 Januari 2022

Kerawa TIM PEREVIU  
  
LEMBAGA  
PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
ABDUL SOKIB ZUNAIDI, M.Si  
196907062002121003  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, REKREASI DAN OLAH RAGA  
\* 19061

